



**DAMPAK PENGELOLAAN ALOKASI DANA NAGARI
SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugasdan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

OLEH :

**MUHRI SALAM
NIM. 1840200325**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**DAMPAK PENGELOLAAN ALOKASI DANA NAGARI
SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang
Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah*

OLEH :

**MUHRI SALAM
NIM. 18 402 00325**

PEMBIMBING I

NOFINAWATI, M.A.

NIP: 19821116 201101 2003

PEMBIMBING II

FERRIALFADRI, M.E.

NIP: 19940928 202012 1007

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARYPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Muhri Salam**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 11 April 2023

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
AddaryPadangsidimpuan
Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Muhri Salam** yang berjudul "**Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Nofinawati, M.A.
NIP. 19821116 201101 2003

PEMBIMBING II

Ferri Alfadri, M.E.
NIP. 19940928 202012 1007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: MUHRI SALAM

NIM : 18 402 00325

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

JudulSkripsi : **DAMPAK PENGELOLAAN ALOKASI DANA NAGARI
SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam NegeriSyekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 11 April 2023



Saya yang Menyatakan,

MUHRI SALAM
NIM. 18 402 00325

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : MUHRI SALAM

NIM : 18 402 00325

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Padatanggal : 11 April 2023

Yang menyatakan,



MUHRI SALAM
NIM.18 402 00325



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpun 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQSYAH SKRIPSI**

NAMA : MUHRI SALAM
NIM : 18 402 00325
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH
**JUDUL SKRIPSI : DAMPAK PENGELOLAAN ALOKASI DANA
NAGARI SEBELUM DAN SESUDAH
PEMEKARAN TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT**

Ketua

Dr. Darwis Harahap, M.Si
NIDN. 2018087802

Sekretaris

Azwar Hamid, M.A
NIDN. 2111038601

Anggota

Dr. Darwis Harahap, M.Si
NIDN. 2018087802

Azwar Hamid, M.A
NIDN. 2111038601

Ferni Alfadri, M.E
NIDN. 2028099401

Samsuddin Muhammad, M.Si
NIDN. 0105128603

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpun
Hari/Tanggal : Selasa/ 16 Mei 2023
Pukul : 14.00 WIB s/d 16:10 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/76,25



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : DAMPAK PENGELOLAAN ALOKASI DANA
NAGARI SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

NAMA : MUHRI SALAM
NIM : 18 402 00325

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 14 Juli 2023
Dekan

Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Muhri Salam

NIM : 18 402 00325

Judul Skripsi : Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan dasar yang terlihat dari rumah yang layak, pangan yang cukup, sandang yang terlengkapi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat yang maksimal. Tahun 2018 nagari bataan yang pada awalnya mencakup 26 jorong dilakukan pemekaran menjadi 5 nagari. Guna dari pemekaran itu adalah untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat yang lebih merata juga untuk peningkatan anggaran alokasi dana nagari dan membuka lapangan kerja yang lebih banyak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) sebelum dan sesudah pemekaran, bagaimana dampak pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) sebelum dan sesudah pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat, apafaktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) sebelum dan sesudah pemekaran. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) sebelum dan sesudah pemekaran dan bagaimana dampak pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) terhadap kesejahteraan masyarakat di nagari bataan dan nagari pemekaran serta mengatuhi paktor penghambat pengelolaan alokasi dana nagari.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan dampak alokasi dana nagari, teori-teori yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah dampak, alokasi dana nagari, pemekaran, kesejahteraan masyarakat, Dan alokasi dana nagari dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data primer dan skunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah tringulasi sumber dan teknik data, dan menggunkana bahan refrensi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sesuai dengan hasil temuan di lapangan menyatakan pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) sesuai dengan peraturan pemerintah pasal 5 ayat 1 dan 2, sumber dana dari PAN, Kementerian desa, dan pajak daerah. Dampak dari pengelolaan alokasi dana nagari sebelum pemekaran tidak memberi dampak positif yang adil dan merata bagi masyrakat, sedangkan sesudah pemekaran masyarakat belum mendapat dampak baik, faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) sebelum pemekaran adalah jumlah anggaran yang minim, SDA yang lemah, dan cakupan wilayah yang luas, sedangkan sesudah pemekaran hambatannya adalah belum adanya kantor resmi nagari baru, Covid 19, keterlamabatan anggaran, dan SDA yang masih lemah.

Kata kunci : Alokasi Dana Nagari (ADN) dan Kesejahteraan Masyarakat.

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur peneliti sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam kita junjungkan kepada suri tauladan umat manusia Nabi Muhammad SAW yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan, yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Skripsi dengan judul **“Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”**, ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah, di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN Syahada) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dari dosen pembimbing dan motivasi dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.A., selaku Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA., selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan

Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SyahadaPadangsidimpunan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan S.E, M.Si., selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Rukiah Lubis, M.Si., selaku Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra, Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan seluruh civitas akademika UIN Syahada Padangsidimpunan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syahada Padangsidimpunan.
4. Ibu Nofinawati, M.A. selaku Pembimbing I dan bapak Ferri Alfadri, M.E, selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh civitas akademika UIN Syahada Padangsidimpunayang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan, dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syahada Padangsidimpunan.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SyahadaPadangsidimpunan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

7. Terimakasih kepada Bapak Wali Nagari Batahan Pusat, kepada bapak Sekertaris Nagari Batahan Pusat, dan seluruh staf dan pegawai Nagari Batahan Pusat. Begitu juga dengan Bapak Wali Nagari Batahan Pemekaran dan seluruh staf yang sudah membantu dan memberikan izin dan data yang peneliti butuhkan selama peneliti melakukan penelitian.
8. Teristimewa kepada Ayahanda Edwar Nasution serta Ibunda tercinta Rosmilan Matondang yang telah mengasuh, mendidik, membimbing dan memberikan kasih sayang, dukungan moral serta doa tulus yang selalu senantiasa mengiringi langkah peneliti. Teristimewa juga kepada 10 saudara-saudari peneliti yang sangat peneliti sayangi dan cintai yaitu kak Hawariah, S.Pd, bang Hafids, S.Pd, kak Aswidah, S.Pd, kak Muhaira, S.Pd, kak Fatma Muhriza, M.Pd, kak Mahmudah Cuda, S.Pd, dan adik Ahsanul Puad yang sedang berusaha juga meraih gelar S.Sos nya, adik Akmalia Ahmad, dan special sibungsu Wildatul Mar'ah yang selalu memberikan motivasi dan memanjatkan doa- doa mulia yang tiada henti-hentinya kepada peneliti. Serta telah menjadi penyemangat peneliti dalam menyelesaikan studimulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai kuliah di UIN Syahada Padangsidimpuan.
9. Teristimewa untuk abang ipar dan keponakan peneliti yang selalu memberikan semangat bantuan materil dan motivasi kepada peneliti untuk lebih giat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teristimewa untuk sahabat peneliti Hasrul Sani S.E, Sardi Riski, Hamdi Hidayat Harahap S.E, bang Erwin Efendi, S.Sos, Erwin Sanjaya Hasibuan S.E, Sahlan Andi Simamora, Asrul Syaputra Simanjuntak, M Ali Ridho Lubis, Winda Mutiara Tanjung, Nelli Agustina Siregar S.E, Saitarida Pulungan S.E,

dan Rahwil Siregar, Mahendra, Tenri dan Ferry yang selalu memberikan semangat dan energi positif untuk peneliti. Juga kepada keluarga besar AK-3, KKL Kelompok 2 desa Batahan 1, dan Kelompok Magang BPS PALUTA.

11. Terimakasih kepada keluarga besar MDTA Pijorkoling, SMP IT Darul Hasan, semua tempat mengajar les bak di Sitamiang, Batu Nadua, dan Singali yang selalu memberi suport dan bantuan materi kepada peneliti untuk selalu semangat dan terus berbuat semaksimal mungkin.
12. Terkhusus kepada partner dan sahabat terbaik kepada diri sendiri Muhri Salam yang selalu semangat berjuang dan tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia.
13. Terkhusus kepada Bank Indonesia (GenBI), BAZNAS PASBAR, KAMMI dan pemerintah Pasaman Barat yang sudah memberikan beasiswa kepada peneliti selama kuliah di UIN Syahada Padangsidempuan.
14. Terimakasih kepada SPACY putih tua yang selalu setia dan eksis menemani peneliti dalam berjuang baik kuliah, melakukan penelitian, dan mengajar. Dan terimakasih untuk Labtob Zyrex milik buk Winda Mutiara yang menemani dan membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih

banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidempuan, April2023

Peneliti,

MUHRI SALAM

NIM : 18 402 0325

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathāh	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathāh dan ya	Ai	a dan i
	fathāh dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *tamar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ۱. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR	
GAMBAR.....	xv
i	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Istilah	11
C. Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	16
1. Dampak	16
2. Pengelolaan Alokasi Dana Nagari.....	16
3. Nagari	19
4. Pemekaran Nagari	20
5. Kesejahteraan Masyarakat.....	20
6. Pandangan Islam Tentang Alokasi Dana Nagari (<i>Maqoshid</i> <i>Syariah</i>).....	21
B. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi, dan Waktu Penelitian.....	29

B. Jenis Penelitian	29
C. Subjek Penelitian.....	29
D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	33
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Batahan	38
1. Kondisi Nagari	38
2. Demografi	39
3. Keadaan Sosial	40
4. Keadaan Ekonomi	41
5. Potensi Dan Masalah Nagari	43
6. Visi Misi.....	43
7. Kebijakan Pembangunan.....	44
8. Struktur Pemerintah Nagari.....	45
9. Kantor dan Wilayah Nagari	46
B. Hasil Penelitian	48
1. Observasi.....	48
2. Wawancara.....	49
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	63
D. Keterbatasan Penelitian	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nama Nagari Pemekaran dan Nama Jorong di Nagari Pemekaran	6
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Nagari Batahan	7
Tabel 1.3 Jumlah Alokasi Dana Nagari Sebelum Dan SesudahPemekaran.....	9
Tabel 2.1Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 4.1Struktur Pemerintahan Nagari Batahan	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	40
Gambar 4.2	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama dari pembangunan pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, dan pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan pada dasarnya tidak hanya dipandang dari sisi pembangunan fisik atau infrastruktur saja, namun mencakup pembangunan sosial politik ataupun pembangunan ekonomi masyarakat serta yang paling penting pembentukan karakter Islami dan akhlak yang baik, karena Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim sudah sangat sewajarnya ada pembentukan karakter yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam.¹

Pada dasarnya tujuan utama pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat dalam kurun waktu jangka panjang. Pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan tentu untuk meningkatkan produktifitas setiap individu atau juga kelompok. Pembangunan ekonomi pada biasanya ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.

Pembangunan ekonomi yang dilandasi dengan pengelolaan dana pemerintah adalah bertujuan untuk melakukan pemerataan pembangunan daerah sekitar juga pemerataan ekonomi masyarakat. Pada dasarnya

¹ Loncoli Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Islam edisi 5*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), Hlm.31.

pembangunan dilandasi juga dengan teori dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan dasar bantuan pemerintah, maka oleh sebab itulah adanya keseimbangan kewajiban yang dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat.² Adapun peranan pemerintah dalam pembangunan ini yaitu memberi bimbingan, arahan, bantuan fasilitas yang diperlukan oleh Nagari Batahan. Sedangkan tugas masyarakat didalam pembangunan ini yaitu turut aktif berpartisipasi dan mempunyai peranyang sangat penting untuk mendorong dalam pembangunannagari, pembangunan nagari ini berbentuk prakarsa dan swadaya gotong royong pada setiap pembangunan yang dilaksanakan.

Melihat dari pembangunan masyarakat desa ataupun nagari yang terjadi dimasa lalu, terutama pembangunan yang terjadi di masa era orde baru, pembangunan nagari merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang telah sah diprogramkan oleh negara secara desentralistik, dimana pembangunan ini dilakukan dengan sifat pemberian wewenang dari pusat kepada daerah oleh pemerintah baik dengan kekuatan dana pemerintah sendiri (dalam negeri) maupun dengan cara bekerja sama dengan negara-negara lain dan organisasi-organisasi internasional.

Secara substansial pembangunan desa ataunagari cenderung dilakukan secara seragam dan merata oleh pemerintah pusat. Program pembangunan ini bersifat *top-down*. Pada era reformasi secara substansial pembangunannagari atau desa lebih fokus kepada desa itu sendiri, sedangkan

² Kansildan Cristine, *Pemerintah Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hlm.3.

pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung hanya menjadi fasilitator dan penyuntik dana, pemberian bimbingan dan pengawasan. Telah banyak program pemerintah yang bertujuan untuk pengetasan kemiskinan yang dilakukan diantaranya program INPRES No.5 Tahun 1993 tentang desa ataunagari tertinggal dan bantuan masyarakat tertinggal. Program pembangunan nagari atau desa lebih bersifat kepada *bottom-up* atau kombinasi *top-down*. Program pembangunan ini tertuang dalam undang-undang otonomi daerah (OTDA).

Adapun otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah maupun undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat ke daerah, sejak wacana itu ada, hal ini memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan melalui otonomi daerah tersebut akan menghilangkan kegiatan-kegiatan praktek sentralistik yang dinilai bahwa dari satu sisi kurang menguntungkan bagi daerah dan masyarakat penduduk lokal.³ Prinsip otonomi daerah adalah menggunakan prinsip yang memberikan kebebasan seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah yang telah sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sesuai dengan esensinya bahwa pembangunan daerah itu dimulai dari tingkat terendah yaitu pemerintah nagari atau pemerintah desa.

³ Pemerintah Daerah, *Undang-Undang NO.32 dan 32 Perubahan Tahun 2004*, (Jakarta: Komisi 2 DPR RI, 2008)

Dalam rangka pembangunannagari yang dilakukan oleh pemerintah tentunya harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumber daya yang digunakan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dirancang serta diwacanakan oleh pemerintah, dan yang selanjutnya memanfaatkan sumber daya yang ada juga potensi ekonomi yang ada, sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat yang baik, merata dan terus berkelanjutan.

Dalam pembangunannagari tentu ada skala prioritas yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah yaitu peraturan Bupati Pasaman Barat tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa ataunagari yaitu untuk:

1. Sesuai dengan pasal 5 ayat 1 peraturan Bupati Pasaman Barat bahwa prioritas penggunaan dana desa atau nagari adalah untuk membiayai program dibidang pembangunannagari dan pemberdayaan masyarakatnagari.
2. Prioritaspenggunaan dana desa sesuai dengan peraturan Bupati Pasaman Barat pasal 5 ayat 2 yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkankesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan pelayanan publik atau masyarakatnagari yang bersangkutan.
3. Sesuai dengan peraturan pemerintah No.72 Tahun 2015 ayat 1 menyatakan bahwa penggunaan dana desa yaitu untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.⁴

⁴Yulianto (Bupati Pasaman Barat), *Peraturan Bupati Pasaman Barat*, (Simpang Empat, 2019) Hlm. 25.

Dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan nagari atau desa pemerintah memberikan perhatian yang sangat luar biasa pada pembangunan desa atau nagari. Perhatian yang besar tersebut tentu dilatar belakangi dengan alasan karena di desa atau nagari adalah tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Adapun strategi pemerintah dalam membantu agar nagari menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Nagari (ADN). Penggunaan dana ADN ini adalah 30% untuk biaya operasional pemerintah nagari dan Badan Musyawarah Nagari (BAMUSNAG), sedangkan 70% adalah untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur dan juga penguatan kapasitas pemerintah desa.

Nagari Batahan adalah salah satu nagari yang ada di kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Nagari ini pada awalnya terdiri dari 26 Jorong yang berada didalam satu naungan yaitu Nagari Batahan, pada tahun 2018 dengan segala pertimbangan dan pemenuhan standar sesuai peraturan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten bahwa diadakannya pemekaran wilayah yang mana yang 26 jorong tadi tergabung dalam 1 nagari ditahun 2018 dimekarkan menjadi 5 nagari yaitu 1 nagari induk dan 4 nagari pemekaran.

Tabel 1.1
Nama Nagari Pemekaran Beserta Nama Jorong di Nagari
Pemekaran Batahan

No	Nama Nagari Persiapan	Nama Jorong
1.	Batahan Induk	a. Silaping b. Rao-Rao c. Pangaran Tengah d. Paninjauan

2.	Batahan Utara	<ul style="list-style-type: none"> a. Paraman Sawah b. Sawah Mudik c. Sigantang d. Silayang Mudik e. Taming Tengah f. Taming Julu g. Tanjung Larangan
3.	Batahan Selatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Siduampan b. Muara Air Talang c. Air Talang
4.	Batahan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> a. Muara Mais Parkandangan b. Silayang c. Lubuk Gobing d. Simpang Tolang Baru e. Simpang Tolang f. Pintu Padang g. Gunung Tua
5.	Batahan Barat	<ul style="list-style-type: none"> a. Kampung Baru b. Kampung Mesjid c. Air Napal d. Taming Batahan

Sumber: Data sekunder diolah oleh peneliti dari Sekretaris Wali Nagari Batahan Tahun 2019

Berikut data jumlah penduduk Nagari Batahan yang diambil dari arsip nagari yang bersumber dari BPS Kabupaten Pasaman Barat melalui sensus penduduk tahun 2020.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Nagari Batahan Kecamatan Ranah
Batahan Tahun 2020

No	Jorong	Jumlah KK	L	P	Jumlah
----	--------	-----------	---	---	--------

1.	Siduampan	687	881	893	1.774
2.	Muara Air Talang	62	130	135	265
3.	Air Talang	92	199	195	394
4.	Silaping	477	924	908	1.832
5.	Rao-Rao	144	259	246	505
6.	Pangaran Tengah	47	87	94	181
7.	Paninjauan	75	169	151	320
8.	Paraman Sawah	80	157	124	281
9.	Sawah Mudik	252	420	448	868
10.	Sigantang	103	163	147	310
11.	Silayang Julu	53	96	90	186
12.	Taming Tengah	79	114	112	226
13.	Taming Julu	147	236	200	436
14.	Tanjung Larangan	101	161	130	291
15.	Muara Mais	298	553	551	1.104
16.	Silayang	282	533	533	1.066
17.	Lubuk Gobing	400	726	716	1.442
18.	Simpang Tolang Baru	105	208	220	428
19.	Simpang Tolang	175	357	358	715
20.	Pintu Padang	136	241	249	490
21.	Gunung Tua	131	257	252	509
22.	Kampung Baru	306	686	693	1.379
23.	Kampung Mesjid	437	844	862	1.706
24.	Air Napal	152	315	290	605
25.	Taming Batahan	218	406	415	821
26.	Pasing Panjang	141	234	246	480
	Total	5.180	8.376	8.941	18.614

Sumber: Data sekunder diolah oleh peneliti dari Administratif Penduduk Sekretaris WaliNagari Tahun 2020 sumber utama dari BPS Pasanan Barat.

Dari tabel diatas terlihat dengan jelas bahwa jumlah penduduk yang begitu banyak, dan luas wilayah yang sudah memenuhi kriteria sesuai peraturan untuk melakukan pemekaran, maka pada tahun 2018 di adakanlah pemekaran nagari. Hal ini juga menjadi paktor pendorong untuk percepatan

pembangunan nagari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan adanya kegiatan pemekaran ini tentu akan meningkatkan jumlah Alokasi Dana Nagari (ADN) yang pada awalnya pada tahun 2018 hanya Rp.1.371.708,800.00- untuk keseluruhan, sedangkan setelah dilaksanakan pemekaran jumlah Alokasi Dana Nagari (ADN) di tahun 2021 menjadi Rp.5.120.000.000- yang terbagi kedalam 5 nagari yaitu, Nagari Batahan, Nagari Batahan Utara, Nagari Batahan Tengah, Nagari Batahan Barat, Nagari Batahan Selatan. Hal inilah yang akan menunjang progres percepatan pembangunan nagari dan menumbuhkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut data alokasi dana nagari sebelum dan sesudah pemekaran di Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat:

Tabel 1.3
Jumlah Alokasi Dana Nagari Sebelum dan Sesudah Pemekaran

No	Tahun	Nama Nagari	Alokasi Dana Nagari (ADN) sebelum pemekaran	Alokasi Dana Nagari (ADN) sesudah pemekaran
1	2017	Nagari Batahan sebelum pemekaran	Rp.1.024.778,752	
2	2018	Nagari Batahan sebelum pemekaran	Rp.1.371.708,800	
3	2019	5 Nagari setelah pemekaran		Rp.5.000.000,000 (Rp.1.000.000,000 /Nagari)
4	2020	5 Nagari setelah pemekaran		Rp. 5.010.000,000 (Rp.1.002.000,000 /Nagari)
5	2021	5 Nagari setelah pemekaran		Rp. 5.120.000,000

				(Rp.1.024.000,000 /Nagari)
--	--	--	--	-------------------------------

Sumber: Data sekunder dari sekretaris dan bendahara wali Nagari Batahantahun2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah Alokasi DanaNagari sebelum dan sesudah dilaksanakan pemekaran sangat jauh berubah yang apabila dipersentasekan 5 kali lipat dari Alokasi DanaNagari (ADN) sebelum pemekaran.

Walaupun demikian dari penelitian sementara yang telah peneliti laksanakan dengan melakukan observasi serta melakukan wawancara kepada beberapa orang masyarakat terkait dampak dari pengelolaan alokasi dana nagari setelah dilaksanakan pemekaran belum ada dampak yang begitu signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi pembangunan infrastruktur, ekonomi, UMKM, pendidikan dan pendapatan masyarakat masih tetap sama sajasebelum dan sesudah pemekaran yang tentunya menjadi pertanyaan dan permasalahan yang serius. Dari persentase kita bisa mengukur jumlah alokasi dana nagari yang meningkat seharusnya memberi pengaruh yang berdampak baik untuk kesejahteraan masyarakat yang bisa di ukur dengan keberhasilan skala prioritas kegunaan alokasi dana nagari itu sendiri.

Dengan diterbitkannya undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang posisi pemerintah desa menjadi semakin kuat karena pemerintah desa atau nagari diyakini lebih mampu diprioritaskan kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara jelas memiliki ruang

kebutuhan permasalahan yang lebih luas dan rumit, untuk itu pembangunan nagari yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi.⁵

Berdasarkan fenomena atau problematika tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana pengelolaan alokasi dana nagari sebelum dan sesudah pemekaran, dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di nagari Batahan dan nagari-nagari pemekaran di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **DAMPAK PENGELOLAAN ALOKASI DANA NAGARI SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.**

B. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah

1. Dampak adalah dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi

⁵http://www.acamedia.edu/5218236/Jurnal_Alokasi_Dana_Desa diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 17.13 WIB

2. Pengelolaan adalah sebuah proses yang mempunyai ciri khas dimana terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan suatu sasaran yang ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya yang lainnya.
3. Alokasi Dana Nagari Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Nagari, alokasi dana desa atau nagari itu merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit, yang pembagiannya untuk desa atau nagari secara proporsional dan aturan yang berlaku di dalam pemerintahan tersebut.
4. Pemekaran adalah memisahkan suatu bagian wilayah yang merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri
5. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan dasar yang terlihat dari rumah yang layak, pangan yang cukup, sandang yang terlengkapi, pendidikan, dan kesehatan yang maksimal.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga dipermudah mendapat data dan informasi yang diperlukan, maka peneliti menetapkan batasan masalah yaitu peneliti mengadakan penelitian atas dampak pengelolaan alokasi dana nagari sebelum dan sesudah pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat pada wilayah pusat nagari induk yaitu Nagari Batahan dan nagari pemekaran yaitu Nagari Batahan Utara, Nagari Batahan Tengah, Nagari

Batahan Barat, Nagari Batahan Tenggara yang ada di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah peneliti cantumkan maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan alokasi dana nagari sebelum pemekaran ?
2. Bagaimana pengelolaan alokasi dana nagari sesudah pemekaran ?
3. Bagaimana dampak pengelolaan alokasi dana nagari sebelum pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat ?
4. Bagaimana dampak pengelolaan alokasi dana nagari sesudah pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat ?
5. Apa saja yang menjadi paktor penghambat pengelolaan alokasi dana nagari sebelum dan sesudah pemekaran di Nagari Batahan ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Nagari sebelum pemekaran.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Nagari sesudah pemekaran

3. Untuk mengetahui dampak pengelolaan Alokasi Dana Nagari sebelum pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat di Nagari Batahan dan masyarakat Nagari Pemekaran.
4. Untuk mengetahui dampak pengelolaan Alokasi Dana Nagari sesudah pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat di Nagari Batahan dan masyarakat Nagari Pemekaran
5. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat pengelolaan alokasi dana nagari sebelum dan sesudah pemekaran.

F. Kegunaan Penelitian

Setelah mengetahui pemecahan masalah kegunaan penelitian yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Bagi Peneliti

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk menambah pengetahuan dan pengalaman khusus yang berhubungan dengan program pengelolaan alokasi dana nagari sebelum dan sesudah dilaksanakannya pemekaran wilayah serta apa pengaruh dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam.

2. Bagi Pemerintah Nagari

Manfaat bagi pemerintah nagari adalah untuk dapat dijadikan sebagai bahan atau landasan rujukan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) sebelum dan sesudah dilaksanakan pemekaran guna untuk kesejahteraan masyarakat Nagari Batahan.

3. Bagi Mahasiswa

Manfaat penelitian ini bagi mahasiswa adalah sebagai bahan yang dapat dijadikan sebagai suatu informasi tentang pengaruh pengelolaan alokasi dananagari dan bagaimana pengaruh dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.⁶

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembuatan proposal ini sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II :Landasan Teori, yang didalamnya mencakupbeberapasubbab,yaitu:kerangka teori merupakan pembahasan danuraian uraiitentang objek penelitian sesuai dengan teori, yangberisesuaijudulyaitu:pengertiandari dampak, pengelolaan, alokasi dana nagari, pemekaran, kesejahteraan masyarakat, selanjutnya penelitianterdahulumerupakan hasil kajian atau penelitian dari orang lainyangrelavandengan penelitian yang dilakukan.

BAB III :MetodologiPenelitianyangberisitentanglokasidanwaktu penelitian.Selanjutnya penjelasan mengenai semua unsur yangdigunakan dalam metode penelitian ini yang mencakup penjelasanmengenaijenispenelitian,teknikpengumpulan, analisisdata,danpengecekan keabsahan data.

⁶ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 2001), Hlm. 131.

BAB IV :Hasil penelitian dan pembahasan yang membahas mengenai hasil pembahasan-pembahasan yang telah dirangkum dalam ruang lingkup objek peneliti dan hasil penelitian.

BAB V : Penutup yaitu menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.¹

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

2. Pengelolaan Alokasi Dana Nagari

Pengelolaan adalah sebuah proses yang mempunyai ciri khas dimana terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan

¹Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang:WidyaKarya) Hlm. 243.

untuk menentukan suatu sasaran yang ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber daya yang lainnya.²

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit, yang pembagiannya untuk desa atau nagari secara proporsional³

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa atau Nagari disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen)⁴

Dalam hal pengelolaan alokasi dana nagari, guna untuk meningkatkan kinerja pemerintah setempat perlu adanya pengawasan, pelatihan dan kerja sama yang sama bagus antara pemerintah dan juga masyarakat. Dalam hal ini perlu adanya pelatihan yang terus ditingkatkan didalam lingkungan pemerintahan Nagari Batahan dan nagari pemekaran. Pelatihan itu sendiri adalah suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam

²Saifuddin, *Pengelolaan Pembelajaran Teoritis Dan Praktis*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), Hlm.53.

³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, (Pasal 68 ayat 1), Hlm.29

⁴Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (Pasal 18).

melaksanakan pekerjaannya lebih efektif dan lebih efisien.⁵ Sehingga dengan adanya pelatihan tersebut akan meningkatkan kinerja pemerintah nagari dalam melaksanakan pengelolaan alokasi dana nagari.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan bentuk pengelolaan alokasi dananagari di Nagari Batahan, dimana pengelolaan dalam perspektif hukum Islam yang menggambarkan suatu pertanggung jawaban yang mutlak. Sebagai salah satu contoh sifat nabi yakni amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang. Dalam hal mengenai pengelolaan alokasi dana nagari yang akuntabilitas dapat dilihat dalam firman Allah surah Al-ahzab ayat 72-73

وَالْجِبَالِ وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ عَلَى الْأَمَانَةِ عَرَضْنَا إِنَّا
 أَن إِنَّهُ رَأَىٰ نَسْنُ وَحَمَلَهَا مِنْهَا وَأَشْفَقْنَا أَن فَأَبِينِ
 وَالْمُنَافِقَاتِ الْمُنَافِقِينَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ ﴿٧٢﴾ جَهُولًا ظَلُومًا
 الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اللَّهِ وَيَتُوبَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ
 رَّحِيمًا غُفُورًا اللَّهُ وَكَانَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴿٧٢﴾

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh. Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki

⁵Nofinawati, dkk, Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Puskesmas Hutaraja Kecamatan Muara Baatang Toru, (Vol.5.No. 1, Juni 2017), Hlm.111.

*dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁶

Al-Aufi berkata dari Ibnu Abbas: yang dimaksud dengan *Al-Amanah* adalah ketaatan yang ditawarkan kepada mereka sebelum ditawarkan kepada Adam akan tetapi mereka tidak menyanggupinya. Lalu Allah berfirman kepada Adam: Aku memberikan amanah kepada langit dan bumi serta gunung-gunung, akan tetapi mereka tidak menyanggupinya. Apakah engkau sanggup untuk menyanggupinya?, dia menjawab *ya rabb-ku* apa isinya?. Allah berfirman: Jika engkau berbuat baik, engkau akan diberi balasan, dan jika engkau berbuat buruk, engkau akan disiksa. Lalu adam menerimanya.⁷

Firman Allah: sehingga Allah mengajab orang-orang munafik laki-laki dan atau perempuan dan orang-orang musrikin. Yaitu anak Adam bersedia menanggung amanah ini, tapi mereka tidak amanah atas tanggung jawab itu. Seperti itulah halnya dalam pandangan Islam terhadap bagaimana kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bertanggung jawab dengan amanah yang sedang kita terima.

3. Nagari

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari beberapa himpunan suku yang

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *syami-Al-Quran*, (Bandung, Sygma, 2012), Hlm.87.

⁷Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafii, 2010), Hlm.121.

mempunyai wilayah tertentu dan dilengkapinya dengan batas-batas khusus, mempunyai kekayaan sendiri, serta berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam memilih pimpinan pemerintahannya.⁸ Sedangkan menurut para ahli yang dimana Soeroto mengemukakan bahwa nagari adalah kesatuan keluarga yang lebih besar dari suku, nagari juga biasanya terdiri dari lebih kurang 4 suku yaitu keluarga besar setali darah dari beberapa *paruik* menurut garis keturunan ibu.⁹

4. Pemekaran Nagari

Pemekaran adalah memisahkan suatu bagian wilayah yang merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri.¹⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan pemekaran Nagari/Desa adalah pemecahan satu desa menjadi dua desa atau lebih sesuai dengan persyaratan dan undang-undang yang mengatur akan hal tersebut.

5. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan dasar yang terlihat dari rumah yang layak, pangan yang cukup, sandang yang terlengkapi, pendidikan, dan kesehatan yang maksimal.

⁸ Abdul Kadir, *Studi Pemerintah Daerah Dan Pelayanan Publik*, (Dharmasraya: Dharma Persada, 2015) Hlm. 14.

⁹ Myrtha Soeroto, *Minangkabau*, (Jakarta: Myrtle Publishing, 2005), Hlm. 20.

¹⁰ Saeful Hakim, *Pemekaran Daerah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Hlm. 72.

Menurut Sunarti kesejahteraan masyarakat adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Salah satu alternatif strategi pembangunan adalah dengan memberdayakan masyarakat telah dikembangkan dalam berbagai dokumen dan gagasan, namun kenyataannya belum dilaksanakan secara maksimal, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menjadi topik yang banyak diperdebatkan dimasyarakat terkait kemajuan negara dimasa depan.¹¹

6. Pandangan Islam Tentang Alokasi Dana Nagari (*Maqoshid Syariah*)

Dalam pandangan Islam penyelenggaraan pemerintah yang baik semestinya bisa menghadirkan *maqoshid syariah* dalam penggunaan dana desa atau nagari. Pengelolaan alokasi dana nagari tersebut harus terstruktur dan terealisasi dengan tepat kepada sasaran, dan pengelolaan alokasi dana nagari tersebut harus sesuai dengan ajaran syariat Islam, yang tentunya juga harus memperhatikan tingkat dan standar penggunaan alokasi dana nagari dari yang paling penting, sedang dan lanjut kepada jenjang yang berikutnya sesuai kebutuhan yang diperlukan di desa atau nagari tersebut.

¹¹Ferri Alfadri dan Aisyah Budi Harahap, *Pemberdayaan Kemandirian Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan*, (Vol.4.No.1, 2021), Hlm.33.

Menurut Mutakin *maqoshid syariah* adalah mewujudkan kemaslahatan dan berusaha menghindar dari segala macam kerusakan. pengaplikasian *maqoshid syariah* dalam kehidupan nyata adalah menghadirkan kemaslahatan dan kebaikan kepada makhluk yang ada dimuka bumi, adapun implementasinya dalam penggunaan alokasi dana nagari adalah mampu memberikan dampak dan pengaruh yang signifikan terhadap terjaganya kemaslahatan ummat manusia terutamanya. Disisi lain juga *maqoshid syariah* ini adalah digunakan untuk menjadi rambu atau panduan dalam penggunaan dana nagari yang diridhoi Allah SWT.¹²

Menurut Al-Syathibi dalam Djalaluddin indikator kemaslahatan ummat itu terbagi kedalam beberapa tingkatan yaitu diantaranya :

1) *Dharuriyat* (kebutuhan primer)

Kebutuhan primer dalam *maqoshid syariah* adalah meliputi menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh an-nafsh*), menjaga akal (*hifzh al-aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), menjaga harta (*hifzh al-mall*). Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang wajib kita penuhi, sebab kalau tidak akan mengadirkan kemudhoratan serta kerusakan yang akan mengancam keselamatan ummat manusia. Pengelolaan alokasi dana nagari yang paling utama adalah untuk meyakinkan dan mewujudkan

¹²Mutakin dan Ali, *Teori Maqoshid Syariah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbah Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.19, NO 3 (Agustus 2017) di akases 28 juli 2022, pukul 09.00 WIB.

terpenuhinya kebutuhan masyarakat dari aspek kebutuhan *dharuriyat* atau kebutuhan primer masyarakat.

2) *Hajiyat* (kebutuhan skunder)

Kebutuhan *hajiyat* adalah suatu kebutuhan manusia dalam memperoleh kelonggaran dalam hidup sehingga mampu menghindarkan diri dari kesulitan. Dalam Islam adalah hukumnya bertujuan untuk meringankan (*rukhsah*), yaitu untuk meringankan beban hidup sehingga hukum terlaksana tanpa ada tekanan. Setelah terpenuhinya indikator yang lima dalam kebutuhan primer (*dharuriyat*) maka penggunaan dana nagari seharusnya mampu dikembangkan dan dikelola untuk menghadirkan terpenuhinya kebutuhan dan program-program skunder guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) *Tahsiniyat* (kebutuhan tersier)

Kebutuhan *tahsiniyat* adalah sesuatu yang layak dan pantas untuk dipenuhi, baik akal maupun adat kebiasaan sehingga memberikan nilai etis yang baik. Kebutuhan ini pada dasarnya adalah tidak wajib, dan apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam dan menimbulkan kesulitan. Implementasi penggunaan dana nagari juga sangat didorong untuk memfasilitasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan *tahsiniyat*, yang mana gunanya untuk menciptakan masyarakat nagari yang moderen dan berkemajuan

sehingga terwujudlah kesejahteraan masyarakat dari segala aspeknya.¹³

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilaksanakan sebelum penelitian ini, dan penelitian tersebut dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini, baik variabel-variabel terkait dan asumsi yang relevan dari hasil penelitian tersebut. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mutia Sumarni (Jurnal Ekonomi Islam, Vol.5 No. 1,2020)	Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Dari hasil linier sederhana menunjukkan bahwa secara varsial variabel pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatdengantaraf kepercayaan 95% hal ini juga menunjukkanbahwa variabel independen pengelolaan dana desa secara varsial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen kesejahteraan masyarakat.
2.	Irmawati (Skripsi)	Pengaruh AlokasiDana	Hasil penelitian ini adalah menyatakan bahwa alokasi

¹³Djalaluddin dan Muhammad Mawardi, *Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwaqaf*, Jurnal Ad-Daulah, Vol. 4, No 2 (2015) di akses 28 Juni 2022. Pukul 11:21 WIB.

	program studi ekonomi syariah, Universitas Muhammadiyah Makasar)	Desa Terhadap kesejahteraan masyarakatdesa di KabupatenJeneponto	dana desa memberi pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jeneponto, hal ini dapat dibuktikan dengan berkurangnya persentase pengangguran dan kemiskinan serta bagusnya pelayanan dan pembangunan desa.
3.	Suci Wulan Dari (Skripsi program studi Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2019)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap KesejahteraanMasyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Hasil penelitian ini adalah pada pelaksanaan pengelolaan ADD tahun 2016-2017di desa Rajosari Mataram dalam mendistribusikan ADDpembangunannya berdasarkanjumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi masing-masing desa, dan faktor penghambat pengelolaan ADD ini adalah rendahnya sinkronisasi antara perencanaan ditingkat desa dan kecamatan, jumlah ADD, rendahnya pendidikan, mengakibatkan akan kurang optimalnya pembangunan. Pelaksanaan dan dampak program ADD 2016 dan 2017 di DesaBejosari Mataram dalam perspektif ekonomi

			Islam belum sesuai dengan Qs. Ar-Ra'ad Ayat : 11. ¹⁴
4.	Beni Mulia (skripsi, program studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Medan Area, 2018.)	Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat	Hasil penelitian ini adalah menjelaskan bahwa proses pemekaran Nagari member dampak kemudahan pelayanan publik karena jangkauan masyarakat yang lebih dekat menuju kantor baru dari Nagari yang dimekarkan. Disisi lain juga sangat menghemat waktu dan biaya masyarakat dalam melaksanakan segala aktifitas kepengurusan segala hal administrasi, juga mendorong kemajuan masyarakat sekitar. ¹⁵
5.	Feni Yudanti Prasyaningts, Susi Sulandari, (Jurnal Administrasi Publik Vol.1 No.6 Departemen Administrasi Publik.	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemeberdayaan Masyarakat Desa KarangLuhur Kabupaten Wonosobo.	Hasil penelitian adalah menyatakan bahwa pengelolaan keuangan dana Karang Luhur dalam pemberdayaan masyarakat termuat dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014tentang pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan,

¹⁴Suci Wulan Dari, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019), Hlm.129.

¹⁵Budi Mulia, *Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat*, (skripsi, program studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Medan Area, 2018), Hlm.144.

	Universitas Diponegoro)		penganggaran, mekanisme permohonan dan pencairan, penggunaan, pengawasan serta pertanggung jawaban. Hal ini berkaitan dengan peraturan Bupati Wonosobo No.75 tahun 2015 tentang pengelolaan dana desa. ¹⁶
--	----------------------------	--	--

Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, adapun persamaan dan perbedaannya ialah sebagai berikut:

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutia Sumarni adalah terletak pada tujuan penelitiannya sedangkan perbedaannya adalah penelitian sumarni kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan kualitatif.
2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Irmawati adalah terletak pada jenis penelitiannya yaitu dengan jenis penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah tempat dan lokasi penelitiannya.
3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Suci Wulan Dari adalah terletak pada target penelitian yaitu pengelolaan Alokasi DanaNagari atau dana desa terhadap kesejahteraan

¹⁶Feni Yudanti Prasetyaningtyas dan Susi Sulandari, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemeberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo*, (Jurnal Administrasi Publik Vol.1 No.6 Departemen Administrasi Publik.Universitas Diponegoro, 2017), Hlm.12.

masyarakat, sedangkan perbedaannya penelitian ini satu kuantitatif
satu kualitatif

4. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Beni Mulia adalah terletak pada pokok utama permasalahan dalam penelitian yaitu dampak dari diadakannya pemekaran disuatu nagari, sedangkan perbedaannya peneliti terfokus pada pembahasan Alokasi Dana Nagari atau anggaran dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat setelah pemekaran sedangkan penelitian yang dilakukan Beni Mulia yaitu berfokus pada dampak pemekaran terhadap pelayanan publik atau pelayanan masyarakat.
5. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Feni Yudanti Prasetyaningtyas dan Susi Sulandari adalah terletak pada rumusan masalah yaitu bagaimana pengelolaan alokasi dana desa atau dana nagari, sedangkan perbedaannya adalah tujuan penelitiannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Nagari Batahan dan Nagari Pemekaran Batahan Utara, Batahan Tenggara, Batahan Selatan. Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Waktu penelitian dilakukan mulai Oktober 2022 sampai dengan Februari 2023.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, Bog dan Taylor (dalam Moleong) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya.¹

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah yang diteliti baik berupa benda, orang, maupun organisasi-organisasi tertentu. Berbicara mengenai subjek penelitian, artinya berbicara mengenai unit analisis, yaitu subjek yang menjadi orang-orang yang memberikan informasi mengenai

¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), Hlm. 4.

kelompok-kelompok tertentu dan informan bukan diharapkan menjadi representasi dari kelompok-kelompok tersebut.

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan yaitu Wali Nagari dan para staf kantor Nagari Batahan, kepala jorong, dan para tokoh masyarakat yang dapat memberikan informasi bagi penulis demi kelancaran penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan dua sumber yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama yang berada dilapangan baik dari orang, tempat, maupun data. Pada penelitian ini data primer diperoleh langsung dengan melakukan observasi langsung ke kantor wali nagari dan terjun langsung ke masyarakat Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan. Kabupaten Pasaman Barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian publik dan terdiri dari struktur data arsip, dokumen, laporan, buku, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian ini.² Sumber data sekunder yang di pakai dalam penelitian ini, bersumber dari objek yang bersifat laporan dan catatan data informasi

²W. Purhantara, *Metode penelitian kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hlm. 79.

tentang pengelolaan alokasi dana nagari sebelum dan sesudah pemekaran di Nagari Batahan dan nagari pemekaran.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi penelitian adalah melakukan pengamatan langsung dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti.³ Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui observasi langsung di kantor wali Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Metode ini adalah metode pengumpulan data dan pencatatan keterangan dari Wali nagari dan staf pegawai dan tokoh masyarakat menyelidiki dan mencatat apa yang diperlukan sehubungan dengan data yang diselidiki. Metode ini merupakan metode pengumpulan data, mencatat informasi yang disaksikan selama penelitian dan mencatat hal-hal yang diperlukan berkaitan dengan data yang diselidiki.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data. Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh *interviewer* dan *inter*

³Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), Hlm. 88.

viewed dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu.⁴

Menurut S. Nasution, wawancara berguna sebagai pelengkap metode pengumpulan data lainnya.⁵ Peneliti melakukan pembicaraan langsung dengan wali nagari, staf, kepala jorong, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variasi berupa foto, gambar, peta, grafik, film, struktur organisasi, catatan bersejarah dan sebagainya.⁶ Peneliti menggunakan metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data lembaga/organisasi yang terkait.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengambil dan menyusun data secara sistematis dari observasi, wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, mengorganisasikan data menjadi sintetik, menyusunnya dalam pola, memilih yang penting untuk dipelajari, dan menyimpulkan. Untuk memudahkan penelitian dan orang lain dalam memahami.⁷

⁴Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016, Hlm. 1-3.

⁵S. Nasution, *Metode Research (penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), Hlm. 127.

⁶Muh Fitrah, Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, (Bojong Ganteng Suka Bumi: CV Jejak, 2017), Hlm. 74.

⁷Sugiyono, *Metodologi penelitian kualitatif*, Cetakan Ke-8, (Bandung: Alfabeta, 2009), Hlm. 244.

Analisis deskriptif kualitatif digunakan sebagai teknik untuk mengelolah data dari hasil penelitian dengan cara triangulasi. Berikut analisis data kualitatif menurut Sugiyono:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah bagian terpenting dari setiap penelitian. Peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ini saling terkait dan melengkapi. Peneliti mengumpulkan data ketika data yang tersedia tidak mencukupi dan berhenti mengumpulkan data ketika data yang mereka butuhkan tersedia.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan fase analisis dimana peneliti membuang data yang tidak diinginkan. Dengan reduksi data, peneliti perlu mencari tahu lebih dalam tentang data atau informasi apa yang hilang, informasi apa yang perlu ditambahkan, dan informasi apa yang perlu dihilangkan. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama kegiatan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mereduksi pengelolaan alokasi dana nagari sebelum dan sesudah pemekaran di Nagari Batahan, untuk disesuaikan dengan kesejahteraan masyarakat di Nagari

Batahan dan Nagari Pemekaran. Kemudian data-datayangtelah diperoleh dan direduksi oleh peneliti relevandengandatayangdibutuhkan.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah pengeditan organisasi informasi dan penjelasan dalam bentuk cerita yang memungkinkan kesimpulan. Penyajian data merupakan kumpulan kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis, dan membacanya memudahkan untuk memahami apa yang sedang terjadi, dan berdasarkan pemahaman tersebut peneliti dapat memahami apa yang sedang dianalisis dan apa yang mereka lakukan.

4. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Sejak awal pengumpulan data, peneliti perlu memahami apa arti berbagai hal yang mereka temui. Kesimpulan perlu divalidasi agar cukup solid dan benar-benar dapat dipahami. Oleh karena itu, Anda perlu melakukan aktivitas berulang untuk mendeteksi dan melacak data Anda dengan cepat.

Data yang telah peneliti peroleh dan dikumpulkan, kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif. Sehingga dengan analisis deskriptif ini dapat dimulai dengan mengumpulkan data dari hasil Observasi, wawancara dan dokumentasi data selanjutnya

menganalisis mengenai bagaimana pengelolaan alokasi dana nagari sebelum dan sesudah pemekaran di Nagari Batahan dan Nagari Pemekaran.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dari adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.⁸Mengenai apa yang dilaporkan peneliti dan apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif pengecekan keabsahan data meliputi:

1. Triangulasi sumber dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi sumber, yaitu untuk menguji data yang ada, maka dilakukan pada staf wali nagari, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang dianggap mumpuni dan memenuhi kriteria dalam memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dari beberapa sumber di atas data tersebut kemudian di deskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan yang spesifik. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan kesimpulan diminta kesepakatan (*member check*) dengan dua sumber data tersebut.

⁸Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Pondok Jati Taman Sidarjo: Zifatama Publisher, 2015), Hlm. 199.

2. Triangulasi teknik dalam pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara akan dicek dengan teknik observasi. Bila dengan berbagai teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan yang dianggap benar. Dalam penelitian ini akan dilakukan pengecekan dengan sumber-sumber yang ada yaitu dari sumber wawancara, observasi, dan sumber buku dan jurnal-jurnal yang digunakan oleh peneliti.
3. Triangulasi waktu dalam pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila dengan waktu yang berbeda dan berulang-ulang maka akan ditemukan kepastian data. Selanjutnya uji kredibilitas yang dipakai yaitu *member check*, yaitu pengkonfirmasi data yang diperoleh yang bersangkutan baik kepada individu ataupun kelompok diskusi pemberi data guna mengetahui data yang disetujui dan yang tidak disetujui. Data yang telah disetujui bersama, maka pemberi data diminta untuk menandatangani, supaya lebih otentik, agar bisa dijadikan bukti bahwa peneliti telah melakukan *member check*.
4. Menggunakan bahan referensi, yaitu sesuatu yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan untuk membuktikan

data yang ditemukan. Seperti hasil wawancara disertai dengan foto atau audio atau rekaman kamera. Menggunakan buku, media online terpercaya, dokumentasi atau hasil survey yang lain.⁹

⁹Ibnu Bandaharo Harahap, *Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank Syariah*, (IAIN Padangsidempuan, 2021), Hlm. 30-40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

Nagari Batahan adalah salah satu nagari yang berada di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.¹

1. Kondisi Nagari

a. Sejarah Nagari Batahan

Sebelum Kemerdekaan Nagari Batahan sudah terbentuk dengan Wali Nagari sebagai berikut :

- 1) Sutan Laut Api Wali Nagari I Tahun 1918
- 2) Raja Bona Wali Nagari II Tahun 1925
- 3) Sutan Saripada Wali Nagari III Tahun 1928
- 4) Raja Tinating Wali Nagari IV Tahun 1935
- 5) Sutan Baringin Wali Nagari V Tahun 1945

b. Setelah Kemerdekaan Nagari Batahan tetap eksis sebagai Pemerintahan Nagari. Wali Nagarinya antara lain :

- 1) Raja ALam Wali Nagari I Tahun 1955
- 2) Raja Mulia Wali Nagari II Tahun 1960
- 3) Khaidir Wali Nagari III Tahun 1963
- 4) Syahrial Wali Nagari IV Tahun 1968
- 5) Iskandar Wali Nagari V Tahun 1970
- 6) B.LB. Mustopa Wali Nagari VI Tahun 1980
- 7) H.A. Thalib Mtd Wali Nagari VII Tahun 2001²

¹ Peta Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat.

² Arsip Dokumen Kepemimpinan Nagari Batahan (2021)

Setelah H.A.Thalib Mtd sebagai Wali Nagari ke tujuh maka Nagari Batahan kembali pada Pemerintahan Desa.

Pada tahun 2001 Pemerintahan di Sumatera Barat kembali ke Nagari.

Wali Nagarinya adalah:

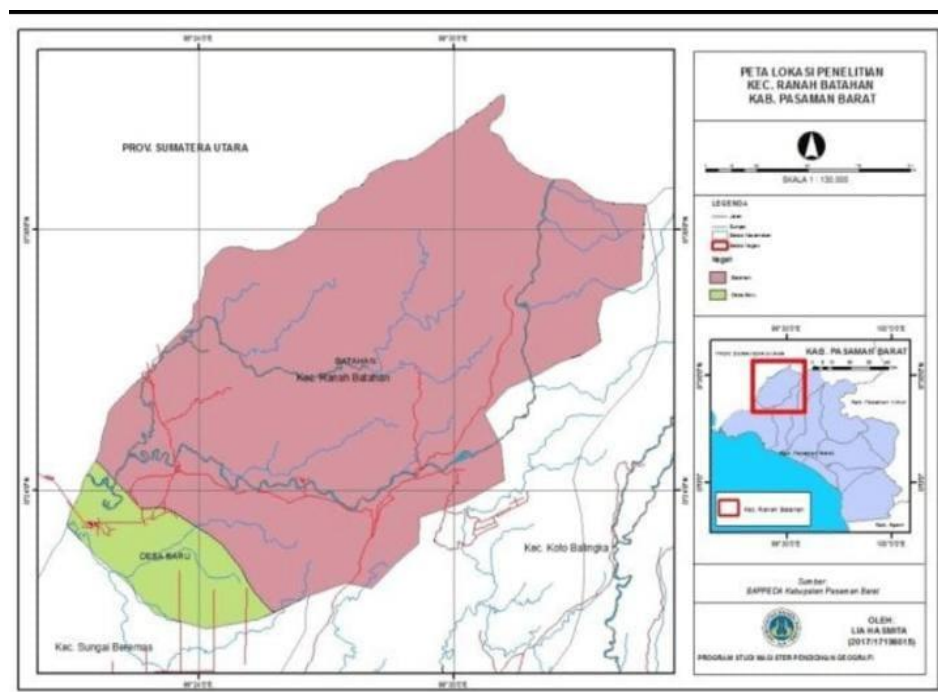
- 1) Togar Sutan Katautan Tahun 2001-2003
- 2) Syafri NST Pejabat Wali Nagari Tahun 2003-2004
- 3) Salamat Riadi Tahun 2004-2009
- 4) Hamulian Pejabat Wali Nagari Tahun 2009-2009
- 5) Drs. H. Syamsir Alam Lubis. MM Tahun 2009-2013
- 6) Syahrudin, S.Pd Tahun 2013-2014
- 7) Salamat Riadi 2014-2019
- 8) Herman Pargauli 2020-2021
- 9) Dani Hanri 2021
- 10) H. Halman 2021

2. Demografi

Nagari Batahan mempunyai luas 402,46 km², dengan batas wilayah utara berbatas dengan kabupaten Madina, selatan berbatas dengan Nagari Air Bagis dan Koto Balingka, sebelah Timur berbatas dengan Koto Balingka, sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Madina, Nagari Batahan secara administrasi yang terdiri dari 26 jorong dengan Jumlah KK 4.850 Jumlah penduduk mencapai 18.617 jiwa yang terdiri dari 9.290 laki-laki dan 9.327 perempuan.³

³ BPS Pasamaan Barat (2021)

Gambar 4.1
Peta Wilayah Nagari Batahan



Sumber : Arsip Nagari Batahan

3. Keadaan Sosial

Masyarakat Nagari Batahan mempunyai nilai budaya yang masih bertahan ditengah-tengah masyarakat dimana kehidupan Adat masih bertahan, terdapat sarana ibadah antara lain : Masjid 29 unit, Mushalla 4 unit, Langgar 4 Unit, Kesehatan : PUSKESMAS RAWAT INAP 1 Unit, Pustu 1 Unit, Posyandu 29 Unit, Polindes 21 Unit, Pendidikan SMA 1 Unit, SMK 1 Unit, Madrasah Aliyah (MA) Negri 1 Unit, Swasta 5 Unit, MTs Swasta 8, SMPN 1 Unit, SDN 20, PAUD/TK 22 Unit, TPA/TPSA 34 Unit, MDA 4 Unit, Kursus 1 Unit.⁴

⁴Baharuddin, Nagari Membangun, (Padang, 2018), Hlm.32.

4. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat nagari bataan secara umum bertumpu pada sektor pertanian terutama sub sektor perkebunan, dengan komoditas unggulan Karet, kakao, kelapa sawit, Padi Sawah, dan jagung. Komoditas Unggulan inilah yang menjadi penggerak perekonomian Masyarakat. Peningkatan ekonomi sangat ditentukan oleh transaksi ekonomi di suatu kawasan, terutama ketersediaan pasar, untuk itulah Nagari Bataan memfokuskan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat nagari, pasar menjadi prioritas utama, hingga tahun 2022 ini. Prasarana perekonomian yang ada di pasar yang terus dalam pengelolaan baik dari segi jumlah prasaran maupun segi kelembagaan pasar dan manajemen pasar, saat ini di Nagari Bataan tepatnya 2 Pasar yaitu pasar Nagari di kampung baru dan pasar nagari silaping, dari 2 pasar ini pasar nagari di Silapinglah yang mempunyai sarana terlengkap, dimana kepemilikan tanah bangunan pasar luas \pm 12.000 M yang berasal dari penyerahan ninik mamak untuk lokasi bangunan pasar nagari.⁵

Tahun 2021 ini terdapat 23 unit ruko, 7 unit ruko semi permanen, 14 ruko pendukung lingkungan pasar, 110 unit kios semi permanen, 160 los semi permanen, 116 lapak, 267 lesehan, dan 20 unit tenda, dengan jumlah pedagang 717 orang yang berasal dari nagari bataan 75%, Nagari sekitarnya 25%, sementara jenis dagangan yang diperjual belikan di pasar tersebut sebanyak 25 jenis dagangan ;

Dan rincian luas Kebun Sawit, Karet, Kakao dan Sawah sebagai terlampir.

⁵ Totop Yusuf M, (Sekretaris Nagari Bataan)

1. Kondisi Pemerintahan Nagari

Pemerintahan Nagari Batahan merupakan Kolaborasi antara pemerintahan Nagari, dengan BAMUS Nagari.

a. Struktur Pemerintahan Nagari

1) Pemerintahan Nagari terdiri dari :

- a) Pemerintah Nagari
- b) BAMUS Nagari (Badan Musawah Nagari).

2) Struktur Pemerintah Nagari terdiri dari :

- a) Wali Nagari
- b) Sekretaris Nagari
- c) KAUR
- d) KASI
- e) STAF Nagari
- f) Kepala Jorong⁶

3.) Organisasi Pendukung

- a) LPMN
- b) KAN Nagari
- c) TP.PKK
- d) Karang Taruna
- e) Koperasi BNBM (BUM Nagari)
- f) LMJ (Lembaga Musyawarah Jorong)
- g) Korp Dai dan Muballigh Nagari

⁶ Peraturan Nagari, No 4, 2016

5. Potensi dan masalah nagari

a. Potensi Nagari

Potensi yang ada di Nagari Batahan adalah berupa Perkebunan, Sawah, Ternak, Pertambangan Kehutanan, Kayu dan hasil hutan non Kayu, Potensi yang dimaksud akan terus dikembangkan. Nagari Batahan juga punya potensi pasar, yaitu Pasar Silaping, Pasar Jorong Silayang, dan Pasar Kampung Baru.⁷

b. Masalah Nagari

Permasalahan di Nagari Batahan sering menyangkut pada letak Nagari Batahan sebagai yang berbatasan dengan kabupaten Madina, sebab sebagai gerbang perbatasan tentunya banyak membawa dampak permasalahan. Permasalahan lain di Nagari Batahan adalah mengenai keterbelakangan dibidang ekonomi, Pendidikan, dan lain-lain.⁸

6. VISI dan MISI

a. VISI

- Nagari Batahan Sejahtera dan Mandiri

b. MISI

- Memberdayakan dan Meningkatkan Kapasitas Anak Nagari Batahan.
- Pengoptimalisasian Lahan Tidur Menjadi Lahan Produktif
- Intensifikasi Tanaman Pangan
- Revitalisasi Pasar Nagari Batahan

⁷Baharuddin, Nagari Membangun, (Padang, 2018), Hlm.74.

⁸ Yulham Nasution (Wali Nagari Batahan), 12 Januari 2023.

7. Kebijakan Pembangunan

a. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan nagari mengacu pada : Swadaya, Bantuan pemerintahan, dan Pengembangan Nagari oleh investor.

b. Potensi dan Masalah

Potensi di Nagari Batahan cukup menunjang terutama dari kemauan masyarakatnya dalam menimba pendidikan. Potensi yang lain adalah berupa Lahan, sumberdaya alam dan lain-lain.

Masalah di Nagari Batahan datangnya dari permasalahan social, ekonomi, budaya, politik dan KANTIBMAS.

c. Program Pembangunan Nagari

Program Pembangunan Nagari terdiri dari program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

d. Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian didasarkan pada landasan kemampuan yang ada pada masing-masing bidang. Pencapaian tujuan pembangunan juga dilandaskan pada asas norma, kebutuhan, manfaat, agama, dan lain-lain.⁹

8. Sturuktur pemerintahan nagari batahan pusat tahun 2022

Struktur pemerintahan Nagari Batahan per-tahun 2022 adalah sebagai berikut:

⁹ Totop Yusuf M, (Sekertaris Wali Nagari Batahan), 12 januari 2023

Tabel 4.1
Struktur Pemerintahan Nagari Batahan
Tahun 2022

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	YULHAMNAS, SH. NIP. 19690412199921001	Pj. Wali Nagari Batahan	Silaping
2.	TOTOP NIP.196909012012121002	SEKNA	Sawah Mudik
3.	IRA GUSLIANA	Kaur Perencanaan	Kampung Mesjid
4.	TAUFIK SIANGGIAN	KasiKesra	Simpang Tolang Baru
5.	RISNA SARI	Kasi Pelayanan	Silayang
6.	NETI ANRIANI	Kaur Umum	Paninjauan
7.	ROSNANI, S.Pd	Kaur Keuangan	Gunung Tua
8.	ILHAM DITA	Kasi Pemerintahan	Silaping
9.	AULIANA MURNI	Staf	Kampung Baru
10.	NETTI NASUTION	Staf	Silayang
11.	SITI AISYAH	Staf	Sigantang
12.	SONDANG WAHYUNI	Staf	Pagaran tengah
13.	NURNAJMAH	Staf	Kampung Baru
14.	LAILAN NAJMAH	Staf	Pintu Padang
15.	DONI ROMATUA	Staf	Muara Mais
16	SILKA MEILIA	Staf	Silaping

Sumber: Arsip nagari Batahan

9. Kantor dan wilayah Nagari Batahan

Gambar 4.2
Kantor Pusat Nagari Batahan



Sumber: Dokumentasi langsung 7 januari 2023

Luas nagari ini adalah 308,82 KM², atau 87,02 % dari luas wilayah Kecamatan Ranah Batahan. Jarak dari Kantor Wali Nagari ke Ibu Kota Kecamatan adalah 0 KM, dan jarak kantor wali nagari ke ibu kota Kabupaten adalah 79 KM dan jarak ke ibu kota provinsi adalah 253 KM.¹⁰NagariBatahan merupakan salah satu nagari tua yang berdiri sejak tahun 1918 dimana yang menjabat sebagai Wali Nagari pertamanya adalah Sutan Lautan Api yang menjabat sejak tahun 1918-1925.Nagari yang terdiri dari 26 jorong iniseiring dengan perkembangan jaman terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang begitu pesat.¹¹Sebagaimana data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Pasaman

¹⁰Arsip peta wilayah Nagari Batahan, (*perbatasan wilayah nagari*) dari sekretaris Nagari Batahan

¹¹ Totop Yusuf M, Sekretaris Wali Nagari Batahan (7 Januari 2023, Pukul 14.15)

Barat tahun 2020, jumlah penduduk Nagari Batahan adalah 18.614 yang terdiri atas 8.376 laki-laki, 8.941 perempuan dan terdapat bahwa di Nagari Batahan terdiri atas 5.180 KK.

Nagari Batahan terdiri atas beberapa suku yaitu, suku Minang, Mandailing, Jawa, Pesisir, Melayu dan Batak. Dengan begitu banyaknya suku yang ada di Nagari Batahan sehingga menghadirkan begitu banyak budaya dan adat yang dipakai dan dilestarikan di Nagari Batahan. Mata pencaharian penduduk Nagari Batahan yang paling utama adalah Berkebun, bertani, berdompeng, kariawan, ASN dan buruh harian. Hasil alam Nagari Batahan diantaranya adalah sawit, jagung, kayu (jati, meranti, goti, mahoni, pinus), kayumanis, nilam, emas, dan karet. Nagari Batahan sebelah Utara berbatasan dengan hutan MADINA Sumatera Utara, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sampuran Kecamatan Ranto Baek, Sebelah Selatan Berbatasan langsung dengan Jorong Air Runding Kecamatan Koto Balingka, dan sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Desa Baru.¹²

Nagari Batahan pada tahun 2018 melakukan pemekaran menjadi 5 bagian, hal ini dilatar belakangi dengan pertumbuhan penduduk yang begitu pesat dan cakupan wilayah yang sudah sesuai dengan peraturan untuk melakukan pemekaran wilayah. Sebagaimana yang termaktub dalam UU No.32 Tahun 2004 dan PP No.78 Tahun 2007 untuk memekarkan suatu daerah atau wilayah ada 3 persyaratan yakni :

1. Persyaratan Administratif

¹² Salam Riadi, Ketua BAMUS Nagari Batahan (8 Januari 2023, Pukul 11.25)

2. Persyaratan teknis
3. Persyaratan fisik kewilayahan

Sehingga Nagari Batahan yang sudah sangat memenuhi semua persyaratan tersebut baik secara administratif, teknis dan juga wilayah yaitu, Nagari yang terdiri dari 26 Jorong tersebut dimekarkan menjadi 5 Nagari, dengan tujuan utamanya adalah untuk meratakan pembangunan dari segala aspek kehidupan dimasyarakat Nagari Batahan dan nagari-nagari yang sudah di mekarkan.¹³ Disamping itu juga tujuan utama dari pemekaran tersebut adalah untuk menyerap anggaran pemerintahan nagari yang lebih besar baik anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) ataupun dari pemerintah daerah (APBD) atau yang disebut dengan Alokasi Dana Nagari (ADN).

B. Hasil Penelitian

1. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi dalam suatu penelitian merupakan instrumen yang paling utama, karena peneliti mendapatkan suatu gambaran yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap apa yang akan diteliti.

Observasi dalam penelitian ini bertujuan agar peneliti memperoleh gambaran yang mendalam mengenai dampak pengelolaan alokasi dana nagari sebelum dan sesudah pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat

¹³ UU Pemerintah, Pemekaran Wilayah (Perbub 2010).

di Nagari Batahan. Dalam proses observasi peneliti telah melakukan pra-penelitian kantor Wali Nagari Batahan dan mendapatkan gambaran awal mengenai masalah-masalah yang akan diteliti di dalam pengelolaan alokasi dana nagari baik sebelum dan sesudah pemekaran dari beberapa subjek penelitian yang ditemui oleh peneliti.

Hasil observasi peneliti sebelum dilakukan pemekaran pemerintah nagari kewalahan melayani masyarakat dikarenakan dalam satu nagari harus melayani 26 jorong. Oleh sebab itu pembangunan begitu lambat dan tidak merata kepada masyarakat, baik dari segi infrastruktur, SDA, dan penanganan dan pelayanan lainnya.

Sesudah dilakukan pemekaran mulai terlihat dampak yang diharapkan meningkatkan kesejahteraan dan pemebngunan di nagari Batahan akan terus meningkat dan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat.

2. Wawancara

a. Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Sebelum Pemekaran

Alokasi dana nagari sebelum pemekaran di nagari Batahan priode tahun 2018 kebawah masih mencakup semua jorong yang ada di nagari Batahan, sebelum dilakukan pemekaran nagari Batahan harus mengelola alokasi dana nagari untuk 26 jorong.

Wawancara dengan Bapak Totop Yusuf MTD, S.E.:

“Sebelum kita berhasil melakukan pemekaran nagari tahun 2018, alokasi dana nagari kita masih minim. Alokasi Dana Nagari (ADN) jumlah yang minim tersebut harus kita padakan untuk membangun 26 jorong yang ada pada saat itu. Oleh sebab itulah kita berusaha selama beberapa tahun untuk bisa menyukseskan pemekaran nagari tersebut, sehingga kita bisa lebih mudah mendapata pelayanan dan tentunya anggaran yang kta terima dari

pusat lebih besar serta mewujudkan kesejahteraan yang merata di Nagari Batahan ini”¹⁴

Jumlah alokasi dana nagari sebelum pemekaran di nagari Batahan yaitu sebesar Rp. 1.024.778,752 ditahun 2017 dan Rp. 1.371.708,800 ditahun 2018. Anggaran tersebut diperoleh dari PAN (pendapatan asli nagari), dana transfer dari pusat (dana desa dan nagari), bagian pajak daerah dan redistribusi daerah pasaman barat untuk nagari batahan.

Wawancara dengan ibuk Ira Gusliana S.Sos,I

“Alokasi dana nagari kita sebelum pemekaran sangat minim, dan jangkauannya begitu luas yaitu 26 jorong. Sumber anggaran nagari per tahun 2018 bersumber dari PAN, Alokasi Dana Desa atau Nagari, dan dari pajak daerah. Anggaran tersebutlah yang kita manfaatkan sebelum dilakukan pemekaran.”¹⁵

Pengelolaan ADN sebelum pemekaran di nagari Batahan adalah sesuai dengan peraturan bupati Pasaman Barat yaitu: perbub pasal 5 ayat 1 dan 2, alokasi dana nagari tersebut dipergunkan untuk pembangunan nagari, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan pelayanan publik. Disisi lain juga alokasi dana nagari tersebut diperuntukkan sebagai biaya operasional pemerintahan, salah satunya gaji dan ATK serta kebutuhan lain yang berhubungan dengan internal kantor.

Pemerintah memberikan alokasi dana nagari dengan penggunaan yaitu 30 % untuk biaya operasional pemerintah nagari dan 70 % untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur.

Wawancara dengan bapak Edwar Nasution

“Penggunaan alokasi dana nagari kita sebelum pemekaran diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, memepbaiki

¹⁴ Totop Yusuf MTD, Sekertaris Nagari (Wawancara 7 Januari 2023, Pukul 09.25)

¹⁵ Ira Gusliana, Kaur Perencanaan (Wawancara 7 Januari 2023, Pukul 08.30)

jalan kebun, rehap tempat ibadah, rehap pos kesehatan desa dll. Alokasi dana nagari tersebut 30% digunakan untuk operasional pemerintahan (gaji, ATK, biaya rapat, biaya jalan dinas), dan 70% untuk kegunaan inti dari penggunaan alokasi dana nagari tersebut yaitu untuk pembangunan infrastruktur nagari.”¹⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa pengelolaan alokasi dana nagari sebelum pemekaran yaitu mengelola alokasi dana nagari yang jumlahnya sedikit untuk 26 jorong. Pengelolaan alokasi dana nagari sebelum pemekaran berjumlah Rp. 1.024.778,752 ditahun 2017 dan Rp. 1.371.708,800 ditahun 2018. Alokasi dana tersebut bersumber dari PAN, ADD/ADN dari pusat, dan pajak daerah. Serta penggunaannya 30% untuk opsional dan 70% untuk pembangunan nagari.

b. Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Sesudah Pemekaran

Tahun 2019 nagari Batahan resmi mekar menjadi 5 nagari bagian, yang sebelumnya nagari Batahan menaungi atau mencakup 26 jorong sekarang berubah dengan adanya pemekaran tersebut. Jumlah alokasi dan nagari setelah terjadi pemekaran meningkat lima kali lipat dari sebelumnya. Sesuai peraturan kementerian desa Negara Republik Indonesia bahwa jumlah anggaran untuk per satu desanya lebih kurang 1 miliar rupiah.

Wawancara dengan bapak Yulhamnas, S.H

“Alhamdulillah pemerintah dalam negeri RI tahun 2018 akhir sudah mengeluarkan SK nagari pemekaran kita, Alhamdulillah kita dimekarkan menjadi 5 nagari yaitu batahan induk, batahan utara, selatan, tengah dan barat. Dengan demikian jumlah alokasi dana nagari kita yang sebelumnya lebih kurang 1 miliar menjadi 5 miliar lebih per tahun 2022 kemaren. Tentu anggaran itu akan sangat membantu percepatan pembangunan nagari kita ini. Alokasi dana nagari yang 5 miliar tersebut murni dari anggaran dana desa atau nagari kementerian desa RI, harapannya juga tentunya anggaran

¹⁶ Edwar, Sekertaris Bamus priode 2016-2021 (Wawancara 8 Januari 2023, Pukul 15.30)

tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita di nagari bataan dan nagari pemekaran.”¹⁷

Sumber alokasi dana nagari setelah pemekaran di nagari bataan dan nagari pemekaran :

Wawancara dengan bapak Totop Yusuf MTD

“Sumber alokasi dana nagari kita sesudah pemekaran yaitu dari ADD/ADN, PAN, Pajak Daerah, Setoran pasar nagari dan wisata nagari. Sumber alokasi dana nagari langsung ke rekening nagari secara keseluruhan. ADN untuk nagari pemekaran juga masih tetap masuk kerekening nagari bataan induk ini, hal ini karena belum defenitifnya nagari pemekaran.”¹⁸

Wawancara dengan bapak Muhammad Rafki, S.H

“Sumber alokasi dana nagari kita di nagari pemekaran Bataan Utara ini belum ada yang terstruktur dengan jelas selama 3 tahun ini, anggaran kita masih bersumber dari pusat dan itupun masuk ke nagari induk. Alokasi dana nagari kita selama 3 tahun ini untuk nagari pemekaran bataan utara juga sedikit bersumber dari bantuan dewan kita di kabupaten dan provinsi”¹⁹

Sumber alokasi dana nagari setelah pemekaran sedikit bertambah dibandingkan dengan sebelum pemekaran, hal itu terbukti dengan bertambahnya jumlah alokasi dana nagari yang di terima yaitu sebesar Rp. 5.120.000,000 per tahun 2021, dimana apabila di kalkulasikan dengan membagi kesetiap nagari maka jumlahnya yaitu Rp. 1.024.000,000 per nagari yang ada.

Pengelolaan Alokasi dana nagari Bataan dan nagari Pemekaran:

Wawancara dengan bapak Yulhamnas, S.H

“Alokasi dana nagari sesudah pemekaran tidak jauh berbeda dengan pengelolaan sebelum pemekaran, akan tetapi sesudah pemekaran ini pengelolaan alokasi nagari kita lebih ringan dan mudah karena anggaran yang ada akan kita bagi dengan nagari pemekaran sesuai porsi masing-

¹⁷ Yulhamnas, S.H, Wali Nagari Bataan, (Wawancara 8 januari 2023, Pukul 11.00)

¹⁸ Totop Yusuf MTD, Sekertaris Nagari Bataan, (Wawancara, 7 Januari 2021, Pukul 09.25)

¹⁹ Rafki, S.H, Sekertaris nagari bataan utara, (Wawancara 9 Januari 2023, pukul 09.20)

masing nagari, tugas dinagari induk adalah mebagi anggaran tersebut ke nagari pemekaran. ADN kita diperuntukkan untuk biaya operasional sebesar 30 % dan 70 % untuk pembangunan nagari, hal tersebut sam dengan semua nagari pemekaran. Tantangan kita setelah pemekaran ini pengelolaan alokasi nagari banyak di alihkan dari yang semestinya direncanakan, sejak tahun 2019 akhir sampai tahun 2021 anggaran kita banyak di alih pungsikan untuk penanganan covid 19 yang begitu berdampak parah bagi kehidupan masyarakat nagari bataan dan Indonesia bahkan dunia sekalipun. Sehingga anggaran yang 70 % tersebut banyak dipergunakan untuk penanganan covid 19 mulai dari bantuan tunai kepada masyarakat, penyediaan alat alat pencegahan covid 19, dan poster dan iklan himabauan kepada msyarakat tentang covid 19 tersebut.”²⁰

Wawancara dengan bapak Muzayin Irsadi, S.H

“Pengelolaan alokasi dana nagari kita di nagari Bataan Utara ini berpatokan pada peraturan bupati Pasaman Barat dan perturan pemerintah yaitu alokasi dan anagari kita dikelola untuk pembangunana infrastuktur terutama di nagari kita yang baru mekar, tentunya banyak yang harus kita persiapkan dan kita bangun guna untuk menghadirkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih mudah, nyaman, dan bermnfaat untuk semua elemen masyarakat tentunya. Kita dinagari bataan utara mengelola alokasi dana nagari sesuai peraturan pemerintah tahun 2015, setelah kita menerima anggaran kita langsung mempergunakannya sesuai hasil rapat kerja pembangunan nagari kita ini, meskipun sejak kita berpisah atau mekar tantangan covid 19 begitu besar dan menguras anggaran dan tenaga serta pemikiran kita.”²¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami pengelolaan alokasi dana nagari sesudah pemekaran di nagari Bataan dan nagari pemekaran mengalami peningkatan jumlah anggaran, dimana sebelum pemekaran untuk 1 nagari yang menaungi 26 jorong jumlah anggaran lebih kurang 1 Miliar rupiah berubah menjadi 5 miliar lebih yang dibagi kedalam 5 nagari, jumlah anggaran yang mengalami peningkatan itu bertambah setelah nagari Bataan mengalami pemekaran.

²⁰Yulhamnas, S.H, Wali Nagari Bataan, (Wawancara 8 januari 2023, Pukul 11.00)

²¹ Muzayin Irsadi, S.H, Wali Nagari Bataan Utara, (Wawancara 9 Januari 2023, Pukul 14.00)

Adapun sumber alokasi dana nagari sesudah pemekaran juga tidak jauh berbeda dengan sebelum pemekaran yaitu dari ADD/ADN, PAN, pajak daerah, setoran pasar dan tempat wisata yang dikelola nagari, alokasi dana nagari tersebut langsung masuk ke dalam rekening nagari, sedangkan untuk nagari pemekaran anggaran masih masuk ke rekening nagari induk yaitu nagari Batahan. Untuk sumber alokasi dana nagari di nagari pemekaran selama 3 tahun ini belum ada yang terstruktur, melainkan hanya dari ADD dan bantuan dewan perwakilan daerah. Penggunaan alokasi dana nagari sesudah pemekaran yaitu 30 % untuk biaya operasional dan 70 % untuk pembangunan nagari, hal itu sama antara nagari pusat dan nagari pemekaran, pengelolaan ADN itu juga dikelola sesuai dengan peraturan bupati bahwa penggunaan anggaran itu adalah untuk pembangunan infrastruktur (jalan nagari, tempat ibadah, gedung serbaguna jorong, dan pembangunan yang menjadi tanggungan nagari) dan pemberdayaan masyarakat (pendidikan, PKK, pelatihan tani dan usaha) dan lain-lain.

c. Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Sebelum Pemekaran Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Kegunaan dari pengelolaan alokasi dana nagari tersebut adalah untuk mewujudkan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Sejahtera dibidang sandang, pangan, papan dan terpenuhinya keamanan dan ketentraman bagi masyarakat.

Dampak bagi kesejahteraan masyarakat sebelum pemekaran:

Wawancara dengan bapak Marhoni Lubis

“Pembangunan di jorong Sawah Mudik ini sebelum pemekaran terbilang begitu lambat, ditambah akses ke Nagari Pusat yang begitu jauh sehingga

untuk mengurus satu surat miskin saja kita butuh waktu 1 jam naik kendaraan, ditambah jalan kita yang masih krikil dan tanah menjadikan semua begitu sulit. Begitu juga dengan keadaan sosial dan ekonomi penduduk di jorong Sawah Mudik ini masih begitu rendah dan pengangguran begitu banyak. Dilihat dari sisi pendidikan jorong Sawah Mudik ini masih banyak yang buta huruf sampai sekarang.”²²

Wawancara dengan bapak Ali Bahtar

“Di Jorong Taming Tengah ini pembangunan begitu minim, banyak anak muda yang menganggur, kejahatan seperti mencuri akibat susahnya pekerjaan begitu marak terjadi. Secara nyata kami belum dapat merasakan dampak pembangunan di jorong ini, kami melihat pemerintah nagari lebih dominan membangun ke arah selatan. Tingkat kemiskinan dan pekerjaan yang tidak tetap di lingkungan masyarakat Jorong Taming Tengah ini mencapai 60 % dari penduduk yang ada.”²³

Wawancara dengan ibuk langggo sari

“Lubuk Gobing adalah salah satu jorong yang paling padat penduduknya di Nagari Batahan, tapi kita bisa lihat sendiri mobil saja selama 40 tahun lebih belum bisa masuk ke kampung ini, ketika jembatan gantung yang bisa dilewati kereta itu putus kami dari kampung ini harus naik getek dan biduk. Hal itu sangat miris padahal begitu banyak penghasilan masyarakat dari kampung ini. Kami sangat berharap pemerintah melalui pemerintah nagari dapat membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Jorong ini begitu jauh tertinggal dari jorong lain apalagi dari sisi kesejahteraan sosial ekonomi Jorong Lubuk Gobing ini termasuk salah satu jorong dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tertinggi. Bahkan boleh dibilang pendapatan sebagian masyarakat di Jorong ini belum mencukupi secara baik untuk kebutuhan wajibnya, ditambah begitu banyak masyarakat yang putus sekolah akibat ekonomi yang tidak stabil.”²⁴

Wawancara dengan bapak Naswar Matondang

“Alhamdulillah kami di jorong kampung Baru ini merasakan adanya pemabangunan yang berkelanjutan, seperti pembangunan jalan kebun, pembangunan sekolah TK dan PAUD. Ditambah Alhamdulillah sebelum pemekaran, ditahun 2017 kami diberi bibit ikan, bibit pertanian dan bantuan-bantuan lainnya. Disamping itu juga di jorong kita ini dibangun satu satunya SPBU di kecamatan Ranah Batahan, tarap hidup dan kesejahteraan

²² Marhoni Lubis, Tokoh Masyarakat Sawah Mudik (Wawancara 8 Januari 2023, Pukul 21.00)

²³ Ali Bahtar, Ninik Mamak Taming Tengah (Wawancara 11 Januari 2023, Pukul 21.00)

²⁴ Langgo Sari, ketua PKK Lubuk Gobing, (Wawancara 8 Januari 2023, Pukul 09.25)

masyarakat dari sisi pendapatan ekonomi masyarakat begitu mumpuni dan terbilang lumayan untuk tingkat ekonomi masyarakat desa atau nagari.”²⁵

Wawancara dengan bapak Drs Adisman Lubis

“Kami yang berada dipudasat nagari ini merasa sangat terbantu dengan pelayanan yang dekat dengan kantor, mudah memperoleh informasi, dan banyak mendapatkan bantuan, sehingga secara keseluruhan masyarakat sejahtera ditambah lowongan pekerjaan di pasar, kantor, instansi sekolah begitu padat di ibukota nagari ini, dan jorong Silaping menjadi tolak ukur perekonomian Nagari Batahan dari segala sektor. Dan alhamdulillah di tahun-tahun sebelum pemekara sekalipun sudah banyak infrastruktur dari nagari kita. Hal itu terbukti dengan terbangunnya beberapa MDA, TK, jalan kebun, bantuan pertanian. Alhamdulillah juga akses ke pasar begitu dekat sebab pasar nagari kita berada di pusat nagari ini.”²⁶

Wawancara dengan bapak Muharram

“Kami disini belum mendapat pembangunan, kesejahteraan, bantuan perhatian dari segi apapun, kampung ini adalah kampung terisolir pertama di Nagari Batahan ini, tingkat kemiskinan tinggi, pelayanan susah, akses susah, pendidikan hanya sebatas tamat SD itupun sudah alhamdulillah, jalan kekampung ini masih tanah semuanya, sekolah harus kekampung sebelah, jaringan tidak ada sama sekali, bahkan kunjungan sama sekalipun sangat jarang, kampung tanjung larangan ini kampung yang mungkin tidak di anggap pemerintah. Kami berharap pemerintah kedepannya lebih memperhatikan kami tentunya, minimal akses jalan yang lebih dulu dimana dari kampung ini ke ibu kota nagari Selma 2,5 jam naik kendaraan karena akses jalan yang begitu rusak.”²⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pembangunan dan dampak dari pengelolaan alokasi dana nagari sebelum pemekaran sangat tidak merata di nagari Batahan tingkat kesmikiran dan pengangguran adalah masalah yang paling utama di dorong dengan pelayanan dan akses yang begitu minim dan sulit. Masih banyak jorong atau kampung yang luput

²⁵Naswar Matodang, Kepala Jorong Kampung Baru (Wawancara 7 Januari 2023, Pukul 13.30)

²⁶Drs, Adisman, kepala adat silaping sekaligus kepala SMA 1 Ranah Batahan (Wawancara 7 Januari 2023, Pukul 08.10)

²⁷ Muharram, Kepala Jorong Tanjung Larangan, (Wawancara 10 Januari 2023, Pukul 11.00)

dari perhatian pemerintah nagari Batahan, baik dari pemberdayaan masyarakat apalagi pembangunan infrastrukturnya. Begitu banyak keluhan dari masyarakat dikarenakan kampung atau jorong mereka belum tersentuh pembangunan, mulai dari jalan yang masih rusak total, jaringan internet yang tidak ada, listrik yang belum masuk, kemiskinan dan pengangguran. Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Kasi Kesra nagari Batahan.

Wawancara dengan Taufik Siagian

“Sebelum pemekaran masih banyak jorong yang belum terbangun dengan baik, seperti: jorong tanjung larangan (jalan masih tanah, tidak ada jaringan, belum ada terbangun sekolah), jorong sigantang (belum ada jaringan, jalan masih tanah), jorong taming tengah dan silayang julu (belum ada jaringan, akses jalan yang masih tanah dan sebagian krikil), paraman sawah (jaringan belum ada), jorong lubuk gobing (belum terbangun jembatan permanen, jaringan masih susah padahal jaraknya ke ibu kota nagari hanya 10 KM). Masih banyak pembangunan yang tidak merata karena ADN kita yang sedikit sebelum dilakukan pemekaran waktu itu.”²⁸

d. Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Sesudah Pemekaran Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Target utama dan tujuan utama dari pemekaran itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat, meningkatkan anggaran, memudahkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan pembangunan yang lebih baik. Nagari batahan dimekarkan tahun 2018-2019 juga tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat nagari batahan.

Dampak pengelolaan alokasi dana nagari sesudah pemekaran:

Wawancara dengan bapak Marhoni Lubis

“Tingkat kesejahteraan masyarakat di kampung ini belum merata secara keseluruhan, apalagi disektor perekonomian yang masih sangat minim, pendidikan belum menjadi acuan yang bagi masyarakat sesudah pemekaran ini, kesmidkinan dikampung ini masih tinggi, tapi Alhamdulillah

²⁸ Taupik Siagian, Kasi Kesra Nagari Batahan, (Wawancara 7 Januari 2023, Pukul 07.40)

pengangguran sudah mulai berkurang dan lowongan kerja sudah mulai meningkat. Pembangunan di jorong kita ini sesudah pemekaran mulai terasa dampaknya, seperti pembangunan jalan kebun sudah ada, akses menuju kantor jauh lebih dekat, dan penanganan covid 19 begitu kompak antara masyarakat dan pemerintah nagari Batahan Utara. Meski secara keseluruhan belum terasa langsung tapi untuk dua tiga tahun setelah pemekaran ini sudah mulai terasa dampaknya bagi kehidupan kita. Seperti pelayanan baik, akses dekat, dan bantuan mulai sedikit terasa.”²⁹

Wawancara dengan bapak Ali Bahtar

“Sesudah pemekaran ini Alhamdulillah jalan menuju kampung ini sudah mulai diperbaiki secara bertahap, sudah dibangun TK, dibangun jamban bagi masyarakat yang kurang mampu, meski permintaan kami yaitu jaringan belum ada tapi semoga kedepannya akan terlaksana, dan kami melihat lowongan pekerjaan bagi masyarakat sudah mulai terbuka luas terutama dipemerintahan nagari pemekaran, dai nagari, bamus dan lainnya. Tapi sejauh ini kami masih mendapatkan perhatian untuk pemberantasan kemiskinan dan pendidikan, yang paling utama dibidang pendidikan sangat jauh tertinggal Dari kampung lain.”³⁰

Wawancara dengan ibuk langgo sari

“Sejauh ini kami belum merasakan dampak atas adanya pemekaran di nagari kita ini, sejauh ini belum ada pembangunan yang berdampak bagi masyarakat dikampung ini, jembatan yang suda puluhan tahun kami usulkan belum ada sampai sekarang, kami juga menilai anggaran dana nagari kita belum ada transparansi kepada masyarakat. Kami hanya berharap kedepannya pemerintah lebih memprhatikan kampung ini, dan kami berharap pembangunan lebih merata kedepannya. Serta tentunya pemerintah memberi solusi dan penyelesaian atas kemiskinan yang masih begitu memprihatinkan disini”³¹

Wawancara dengan bapak Naswar Matondang

“Sejauh ini belum ada dampak yang nyata, hanya saja akses lebih dekat menuju kantor nagari untuk mengurus berkas atau surat-surat, malah kami merasa setelah pemekaran ini pembangunan di Nagari Batahan selatan terbilang lambat dan jalan ditempat. Kami tidak melihat adanya

²⁹ Marhoni Lubis, Tokoh Masyarakat Sawah Mudik (Wawancara 8 Januari 2023, Pukul 21.00)

³⁰ Ali Bahtar, Ninik Mamak Taming Tengah (Wawancara 11 Januari 2023, Pukul 21.00)

³¹ Langgo Sari, ketua PKK Lubuk Gobing, (Wawancara 8 Januari 2023, Pukul 09.25)

transparansi anggaran dan tidak ada objek nyata dari apa dampak positif yang memberi kemaslahatan bagi masyarakat setelah pemekaran ini.”³²

Wawancara dengan bapak Drs Adisman Lubis

“Secara langsung kami di kamung silaping ini belum ada merasakan dampak yang nyata dari pemekaran tersebut, karna kami tetap di pusat Nagari Batahan ini. Tapi tentu harapannya pembangunan setelah pemekaran ini lebih meningkat nantinya. Untuk yang 3 tahun ini kami belum merasakan dampak apa apa baik dari pembangunan, penanggulangan kemiskinan, bantuan pendidikan, pelayanan, dan pemberdayaan lainnya. Seperti kita lihat lowongan kerja semakin terbuka bagi masyarakat untuk mengisi jabatan atau kursi di nagari nagari pemekaran”³³

Wawancara dengan bapak Muharram

“Secara langsung setelah pemekaran yang 3 tahun ini kami belum merasakan dampak langsung, tapi pj wali nagari yang baru untuk Batahan Utara sudah datang berkunjung dan mendengar aspirasi kami disini, ditambah mungkin dampak covid 19 yang begitu merubah keadaan, jadi kami selem berdo'a dan berharap untuk kemajuan nagari kita, kami berharap pembangunan ke kampung ini lebih cepat, terutama jalan dan jaringan. Tapi kami bersyukur Alhamdulillah listrik sudah masuk tahun 2020 awal kemaren dan dalam waktu dekat sekolah juga akan dibangun dikampung ini. Alhamdulillah juga 2 orang dari kampung kita ini sudah bekerja di kantor nagari batahan utara yang harapannya akan sangat membantu penyampaian aspirasi kami dari sini. Angka kemiskinan secara perlahan terus diperbaiki dengan memberikan pekerjaan yang layak bagi masyarakat yang mempunyai skill dan kemauan yang tinggi”³⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami secara nyata pemekaran belum memberikan dampak yang begitu signifikan bagi kesejahteraan

³²Naswar Matodang, Kepala Jorong Kampung Baru (Wawancara 7 Januari 2023, Pukul 13.30)

³³Drs, Adisman, kepala adat silaping sekaligus kepala SMA 1 Ranah Batahan(Wawancara 7 Januari 2023, Pukul 08.10)

³⁴Muharram, Kepala Jorong Tanjung Larangan, (Wawancara 10 Januari 2023, Pukul 11.00)

masyarakat, belum ada dampak langsung yang menyentuh pemberdayaan masyarakat Nagari Batahan dan pembangunan fisik dari segi infrastruktur terbilang masih sangat lambat dan minim. Padahal jumlah anggaran sudah meningkat 5 kali lipat dari sebelum adanya pemekaran. Angka kemiskinan yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah untuk mengatasinya masih tetap mentok disitu saja, nagari belum memberikan program untuk menyelesaikan masalah tersebut, begitu juga dengan pendidikan. Sejauh ini Dampak yang paling berpengaruh selama 3-4 tahun pemekaran yaitu pelayanan yang lebih mudah dan dekat. Serta peluang kerja atau lowongan kerja yang akan terus meningkat dan terbuka luas bagi masyarakat, terutama untuk mengisi jabatan di nagari nagari pemekaran.

e. Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Sebelum dan Sesudah Pemekaran

Dalam proses pengelolaan Alokasi dana nagari baik sebelum maupun sesudah pemekaran juga menghadapi kendala dan hambatan yang mengakibatkan pengelolaan tersebut terkadang tidak tepat sasaran, pengelolaan tersebut menjadi lambat. Kendala-kendala itu ada yang bersifat internal dan eksternal , seperti:

Wawancara dengan bapak Yulhamnas, S.H.

“Paktor penghambat pengelolaan alokasi dana nagari kita sebelum pemekaran yaitu jumlah alokasi dana nagari yang sedikit untuk di kelola terhadap 26 jorong, belum ada PAN yang bernilai besar, keterlambatan pencairan anggran dari pusat atau dari provinsi. Hal itulah yang menjadikan ppemabngunan dinagari kita ini sebelum pemkaran terkesan alambat dan tidak mengalami peningkatan, bahkan kami mengakui tidak merata secara keseluruhan. Tapi hal tersebut terus kami perbaiki dan rekap ulang untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari batahan.”

Wawancara dengan bapak Totop Yusuf MTD

“Faktor penghambat pengelolaan alokasi dana nagari sesudah pemekaran di nagari Batahan dan nagari-nagari pemekaran adalah Covid 19, dimana semua anggaran yang sudah terstruktur dengan baik untuk direalisasikan sesuai tupoksinya, akan tetapi semua berubah dan dialihkan kepada penanganan covid 19 tersebut. Faktor lain yang mempengaruhinya juga yaitu anggaran yang diturunkan belum sesuai jadwal, masih minimnya sumber daya masyarakat dan belum adanya anggaran atau penghasilan asli yang bisa membantu keuangan nagari di nagari Batahan dan terlebih di nagari-nagari pemekaran. Temuan lainnya juga memberikan jawaban bahwa pengelolaan alokasi dana nagari belum bagus karena perkembangan teknologi di nagari masih lambat.³⁵

Wawancara Bapak Muzayin Irsadi S.H

“Faktor penghambat pengelolaan alokasi dana di nagari pemekaran ini adalah anggaran yang belum langsung masuk ke nagari pemekaran melainkan masih ke nagari pusat lebih dulu, kurangnya partisipasi dari masyarakat dimana masyarakat yang terkesan tidak mau tau, penggunaan alokasi dana nagari yang dialihkan untuk penanganan covid 19, dan banyaknya pembatalan pembangunan yang mengakibatkan mangkraknya pembangunan jalan-jalankebum yang seharusnya sudah terealisasi dengan baik. Begitu juga di sisi internalnya yaitu dikarenakan struktur pemerintahan yang belum tersinkronkan dan belum akurat dengan baik, sehingga pengelolaan alokasi dana nagari tersebut belum terstruktur, belum tersusun dengan baik.”³⁶

Dari hasil wawancara diatas dipahami bahwa masih banyak terdapat faktor-faktor penghambat pengelolaan alokasi dana nagari di nagari batahan. Baik itu faktor penghambat yang ditemui sebelum pemekaran dan begitu juga sesudah dilakukan pemekaran, tidak terlepas dinagari induk ataupun di nagari hasil pemekaran. Mulai dari jumlah anggaran, komunikasi yang masih kurang baik, seperti di nagari pemekaran anggaran yang masih masuk ke rekening nagari induk, kantor di nagari pemekaran yang belum tetap, anggaran yang terlambat dicairkan dari pusat, pengelolaan SDA nagari

³⁵ Hasil Wawancara Bersama Bapak Totop Yusuf M (SEKNAG Batahan Pusat), 10 Januari 2023, pukul 11.00.

³⁶ Hasil Wawancara Bersama Ibu Ira Gusliana, S.E (KAUR Perencanaan), 8 Januari 2023, pukul 14.30

yang masih minim, dan salah satu faktor penghambat yang tidak bisa dipungkiri yaitu Covid-19.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan temuan hasil wawancara bersama beberapa tokoh masyarakat di nagari Batahan dan nagari pemekaran yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana nagari serta dampak dan faktor penghambatnya sebelum dan sesudah pemekaran sejak tahun 2016 yang diresmikan tahun 2019 awal, peneliti menganalisis semua jawaban dari responden serta menganalisis hasil observasi awal dan observasi selama penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

1. Pengelolaan alokasi dana nagari sebelum pemekaran di nagari Batahan, khususnya dua tahun sebelum pemekaran, ADN dikelola sesuai dengan peraturan daerah yaitu berpatokan dengan peraturan bupati pasal 5 ayat 1 dan 2, yang diperkuat dengan peraturan pemerintah No. 72 tahun 2015 ayat 1 menyatakan bahwa pengelolaan alokasi dana nagari di Nagari Batahan diperuntukkan untuk: pembangunan infrastruktur, pemabangunan sumber daya manusia, dan penanggulangan kemiskinan, pelayanan kesehatan, dan tidak terlepas juga dipergunakan untuk biaya operasional pemerintah nagari batahan dll.

Alokasi dana nagari sebelum pemekaran di nagari bataan bersumber dari PAN (Pendapatan Asli Nagari), Transfer dari pusat yaitu kementerian desa, pajak daerah dan setoran dari pasar dan tempat wisata yang dikelola nagari yang jumlahnya yaitu sebesar Rp.1.371.708,800 per tahun 2018 atau satu tahun sebelum pemekaran. Jumlah anggaran yang 1,3 M tersebut dipergunakan untuk membiayai sebanyak 26 jorong yang ada di Nagari Bataan dengan jumlah penduduk 18.614 jiwa.

2. Pengelolaan alokasi dana nagari sesudah pemekaran di nagari bataan dan nagari pemekaran dikelola tidak berbeda jauh dengan sebelum pemekaran, alokasi dana nagari dipergunakan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah yaitu peraturan bupati pasal 5 ayat 1 dan 2 serta peraturan pemerintah No. 72 tahun 2015 ayat 1. Alokasi dana nagari tersebut dipergunakan untuk pemebngunan infrastruktur (jalan nagari, jembatan nagari, berkaitan fasilitas kesehatan, tempat ibadah dan gedung pendidikan yang di naungi nagari), penanggulangan kemiskinan, pemeberdayaan manusia, yang tentunya guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Bataan yang adil, merata dan terus berkesinambungan. Serta anggaran tersebut juga dipergunakan untuk biaya operasional pemerintahan. Alokasi

dana nagari setiap nagari sejak tahun 2020 sudah mutalak menjadi urusan nagari masing masing dan tetap dalam pantauan nagari induk.

Sumber alokasi dana nagari batahan sesudah pemekaran adalah dari PAN (badan usaha milik nagari, setoran pasar nagari, wisata kelola nagari), dana transfer dari kementerian desa, dan pajak daerah. Jumlah alokasi dana nagari setelah dilakukan pemekaran yaitu sebesar Rp. 5.120.000,000 atau Rp. 1.024.000,000 /nagari. Sesudah pemekaran setiap nagari mengurus nagari masing masing yaitu nagari Batahan induk sebanyak 4 jorong, Batahan Utara 7 Jorong, Batahan Selatan 3 Jorong, Batahan Tengah 7 jorong, dan Batahan Barat 4 jorong.

3. Dampak pengelolaan ADN sebelum dilakukan pemekaran bagi kesejahteraan masyarakat nagari batahan belum memberikan dampak yang positif, hal ini sesuai dengan rangkuman hasil analisis dari hasil wawancara dan observasi langsung dimana, pembangunan yang begitu lambat, bahkan masih ada jorong yang belum tersentuh pembangunan, minim infrastruktur, SDA yang lemah, meski di beberapa jorong merasa puas seperti jorong silaping, air napal, kampung baru, dan pintu padang, sedangkan jorong lain sebelum pemekaran banyak yang tidak tersentuh sama sekali, seperti jorong

lubuk gobing, taming tengah, silayang julu, sigantang, tanjung larangan, dan jorong paraman sawah.

4. Dampak pengelolaan ADN sesudah pemekaran di beberapa jorong sudah mulai terasa dengan baik, meski belum secara signifikan tapi selama 3 tahun jalan 4 tahun pemekaran dampak tersebut sudah mulai terasa berdampak baik. Adapun dampak positif dari pemekaran tersebut adalah :Bagi pemerintah : anggaran semakin meningkat, bisa menciptakan pelayanan terbaik. Bagi masyarakat :akses semakin mudah, lowongan kerja lebih banyak dan terbuka, bantuan semakin banyak.
5. Faktor penghambat pengelolaan alokasi dana sebelum dan sesudah pemekaran.
 - a. Faktor penghambat sebelum pemekaran yaitu jumlah anggaran yang minim, banyaknya penduduk, sumber daya manusia yang minim, keterlambatan dana desa dari pusat.
 - b. Faktor penghambat sesudah pemekaran yaitu belum rampungnya struktur pemerintahan nagari pemekaran, anggaran yang masih sering terlambat cair, sumber daya manusia yang masing minim.

Jika dilihat dari analisis yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa pengelolaan alokasi dana nagari sesudah pemekaran memberikan

dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat di nagari bataan dan nagari pemekaran. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Beni Mulia : *Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat*. Hasil penelitian yang dilakukan Beni menyatakan bahwa pengelolaan alokasi dana nagari setelah pemekaran memberikan dampak positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat. Begitu juga dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan yang menyimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana nagari setelah pemekaran berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

D. Keterbatasan penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar hasil yang diperoleh sebaik mungkin. Namun, dalam prosesnya untuk mendapatkan hasil yang baik ada kesulitan yang dialami, sebab dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan yang dihadapi peneliti adalah :

1. Keterbatasan bahan materi dari penelitian ini, seperti kurangnya referensi buku yang menjelaskan lebih detail tentang nagari.

2. Belum terstrukturnya dengan baik pegawai pemerintahan di nagari pemekaran, karena belum adanya kantor yang tetap untuk 4 nagari yang sudah dimekarkan sehingga hal tersebut membuat peneliti mengunjungi rumah pegawai nagari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh ADN sebelum dan sesudah pemekaran, faktor penghambat pengelolaan ADN sesudah pemekaran, ADN dalam perspektif ekonomi Islam berpengaruh simultan terhadap kesejahteraan masyarakat di nagari bataan dan nagari pemekaran, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pengelolaan alokasi dana nagari sebelum dan sesudah pemekaran tidak berbeda jauh baik dari penggunaan dan sumbernya. Melainkan jumlah anggaran yang berubah dan meningkat sesudah pemekaran.
2. ADN sebelum dilakukan pemekaran di Nagari Bataan belum memberikan dampak pembangunan yang merata, sedangkan sesudah pemekaran pengelolaan alokasi dana nagari sudah mulai memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil temuan di lapangan yang menyatakan bahwa ADN sesudah pemekaran memberi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, lowongan kerja yang semakin terbuka
3. Faktor penghambat pengelolaan ADN sesudah pemekaran tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil temuan di lapangan bahwa faktor penghambat pengelolaan alokasi dana nagari sesudah pemekaran adalah Covid 19 dan anggaran dari pusat, provinsi dan kabupaten belum sesuai dengan waktu yang ditentukan. ADN dalam perspektif ekonomi Islam belum berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dengan

melihat temuan dilapangan bahwa pengelolaan alokasi dana nagari belum transparansi maksimal, dan banyak pembangunana yang belum terselesaikan karena pengalihan anggaran selama 3 tahun terakhir ini,

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk nagari Batahan dan nagari pemekaran

Untuk pemerintahan nagari batahan diharapkan kedepannya agar lebih progresif dan aktif untuk mengelola alokasi dana nagari untuk mamajukan dan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik kedepannya.

2. Bagi masyarakat nagari Batahan dan nagari pemekaran

Diharapkan untuk masyarakat nagari Batahan dan nagari pemekaran agar selalu ikut berpran aktif untuk menjaga dan mamjukan nagari, begitu juga halnya dengan pendidikan, kesehatan dan juga diharapkan masyarakat mengikuti aturan dan selalu menjaga insatansi dan semua bangunan dan pembangunan nagari.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan dan dipergunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya, yang digunakan sebagai refrensi atau juga untuk jadi perbandingan penelitian disuatu daerah dengan daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam As-Syafii, 2010.
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Al-Mujtahadah press, 2010.
- Albi Anggito Johan Setiawan, S.Pd, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Darwis Harahap dan Ferri Alfadri, *Ekonomi Mikro Islam* Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2021
- Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016
- I Gusti Rai Utama dan Bi Made Eka Mahadewi, *Metodologi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*, Yogyakarta: CV Andi Offset, Edisi 1, 2015.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kansildan Cristine, *Pemerintah Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syamil Al-Qur'an*, Bandung, Sygma, 2012.
- Loncoli Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Islam edisi 5*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Pondok Jati Taman Sidarjo: Zifatama Publisher, 2015
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Moersalah dan Musanef, *Pedoman Membuat Skripsi*, Jakarta: Gunung Agung, 2009.
- Muh Fitrah, Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, Bojong Ganteng Suka Bumi: CV Jejak, 2017
- Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007

- Myrtha Soeroto, *Minangkabau*, Jakarta: Myrtle Publishing, 2005.
- Nasutrition, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Pius Abdillah & Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arloka. 2009.
- Saeful Hakim, *Pemekaran Daerah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Saifuddin, *Pengelolaan Pembelajaran Teoritis Dan Praktis*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Sifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, n.d,2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ALFABETA, Bandung, 2014.
- Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2016
- Suharsim Arikusto, *Prosedur Peneletian*, Jakarta: Rineka Cipta Ilmu,2002.
- Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 2011.
- W. Purihantara, *Metode penelitian kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Skripsi:

- Budi Mulia, *Dampak PemekaranNagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat*, skripsi, program studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Medan Area, 2018.
- Suci Wulan Dari, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Jurnal:

- Feni Yudanti Prasetyaningtyas dan Susi Sulandari, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemeberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo*, Jurnal Administrasi Publik Vol.1 No.6 Departemen Administrasi Publik. Universitas Diponegoro, 2017.

Ferri Alfadri dan Aisyah Budi Harahap, *Pemberdayaan Kemandirian Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan*, Vol.4.No.1, 2021.

http://www.acamedia.edu/5218236/Jurnal_Alokasi_Dana_Desa

Mutakin dan Ali, *Teori Maqoshid Syariah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbah Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.19, NO 3 (Agustus 2017)

Nofinawati, dkk, *Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Puskesmas Hutaraja Kecamatan Muara Baatang Toru*, Vol.5. No. 1, Juni 2017

Undang-undang / Perbub:

Pemerintah Daerah, *Undang-Undang NO.32 dan32 Perubahan Tahun 2008*, Jakarta: Komisi 2 DPR RI, 2008.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005.

Yulianto (Bupati PASBAR), *Peraturan Bupati Pasaman Barat*, Simpang Empat,2019.

Wawancara:

Ali Bahtar, Ninik Mamak Taming Tengah (Wawancara 11 Januari 2023, Pukul 21.00)

Drs, Adisman, kepala adat silaping (Wawancara 7 Januari 2023, Pukul 08.10)

Edwar, Sekertaris Bamus priode 2016-2021 (Wawancara 8 Januari 2023, Pukul 15.30)

Ira Gusliana, Kaur Perencanaan (Wawancara 7 Januari 2023, Pukul 08.30)

Langgo Sari, ketua PKK Lubuk Gobing, (Wawancara 8 Januari 2023, Pukul 09.25)

Marhoni Lubis, Tokoh Masyarakat Sawah Mudik (Wawancara 8 Januari 2023, Pukul 21.00)

Muharram, Kepala Jorong Tanjung Larangan, (Wawancara 10 Januari 2023, Pukul 11.00)

Muzayin Irsadi, S.H, Wali Nagari Batahan Utara, (Wawancara 9 Januari 2023, Pukul 14.00)

Naswar Matodang, Kepala Jorong Kampung Baru (Wawancara 7 Januari 2023, Pukul 13.30)

Rafki A.Md, Sekertaris nagari batahan utara, (Wawancara 9 Januari 2023, pukul 09.20)

Salamat Riadi, Ketua BAMUS Nagari Batahan (8 januari 2023, Pukul 11.25)

Taupik Siagian, Kasi Kesra Nagari Batahan, (Wawancara 7 Januari 2023, Pukul 07.40)

Totop Yusuf M, Sekretaris Wali Nagari Batahan (7 Januari 2023, Pukul 14.15)

Yulhamnas, S.H, Wali Nagari Batahan, (Wawancara 8 januari 2023, Pukul 11.00)

CURICULUM VITAE
(Daftar Riwayat Hidup)

DATA PRIBADI

Nama : Muhri Salam
Nim : 1840200325
Tempat/Tanggal Lahir : Sawah Mudik, 7 April 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Anak Ke : 7 dari 10 Bersaudara
Alamat : Sawah Mudik, Ranah Batahan
Agama : Islam
Telepon/WA : 0812 7983 8546

DATA ORANG TUA/WALI

Nama Ayah : Edwar Nasution
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Rosmilan Matondang
Pekerjaan : Petani
Alamat : Sawah Mudik, Ranah Batahan

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2006-2012 : SDN 07 Ranah Batahan
Tahun 2013-2016 : MTSs Sawah Mudik
Tahun 2016-2018 : MAS IB Silaping
Tahun 2018-2023 : UIN SYAHADA Padangsidempuan

PRESTASI AKADEMIK

IPK : 3,74
Karya Tulis Ilmiah : Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Nagari
Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Terhadap
kepuasan masyarakat.

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Karyawan Wali Nagari

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya Nagari Batahan?
2. Bagaimana proses pemekaran nagari Batahan?
3. Apa visi dan misi Nagari Batahan?
4. Bagaimana pengelolaan alokasi dana nagari sebelum pemekaran?
5. Bagaimana pengelolaan alokasi dana nagari sesudah pemekaran?
6. Berapa besaran anggaran ADN sebelum dan sesudah pemekaran?
7. Dari mana sumber alokasi dana nagari sebelum dan sesudah pemekaran?
8. Untuk apa penggunaan alokasi dana nagari baik sebelum dan sesudah pemekaran?
9. Apa kendala dan hambatan dalam pengelolaan alokasi dana nagari sebelum pemekaran
10. Apa kendala atau faktor penghambat pengelolaan alokasi dana nagari sesudah pemekaran

B. Wawancara dengan Masyarakat (Tokoh Masyarakat)

1. Bagaimana dampak pengelolaan alokasi dana nagari sebelum pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat (Bapak/Ibuk)?
2. Bagaimana dampak pengelolaan alokasi dana nagari sesudah pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat (Bapak/Ibuk)?
3. Apa dampak yang bisa bapak atau ibuk dapat rasakan secara langsung sesudah pemekaran?
4. Apakah sesudah pemekaran pembangunan semakin meningkat?
5. Apakah sumber daya manusia meningkat dari sebelum ke sesudah pemekaran di nagari batahan?

Lampiran II

Dokumentasi

Wawancara bersama bapak wali nagari Batahan pusat (bapak Yulhamnas, S.H)



Wawancara 1 bersama bapak sekertaris nagari Batahan (bapak Totop Yusuf, S.E)



Wawancara bersama bapak sekertaris nagari pemekaran Batahan utara (Rafki, A.md)





Observasi dan diskusi bersama bapak sekretaris nagari Batahan (bapak Totop Yusuf MTD, S.E)

